



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

TAHUN
20
25

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja ASN di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dalam penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun

sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang yang lebih baik lagi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang dapat semakin ditingkatkan, sehingga semakin bermanfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, 26 Pebruari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197102251998031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1: “Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin”
 - Diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja serta Program Hubungan Industrial.
 - Target capaian indikator tersebut tahun 2025 adalah 4,3%, realisasinya sebesar 2,90 sehingga capaian realisasinya sebesar 148,28 dengan kriteria sangat tinggi melebihi target yang telah ditentukan.
2. Capaian sasaran strategis 2: “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah”
 - Diukur dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Usaha industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah 2,0% dengan realisasi sebesar 5,47%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 273% dengan kriteria sangat tinggi.
3. Capaian sasaran strategis 3: “Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal”
 - Diukur dengan indikator Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja serta Program Hubungan Industrial.
 - Target capaian indikator tujuan tahun 2025 adalah 12% sampai dengan Bulan Desember 2025 terealisasi -27,32%. Dengan demikian target indikator ini tidak tercapai. Prosentase realisasi terhadap target -227,66% dengan kriteria sangat rendah.
4. Capaian sasaran strategis 4: “Meningkatnya Usaha Industri”
 - Diukur dengan indikator Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,

Program Pengendalian Usaha industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah 3,23 Trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 3,947 Trilyun rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 122,199% dengan kriteria sangat tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang ke depan, sebagai berikut:

1. Penguatan SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
2. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan IKM dalam peningkatan pertumbuhan IKM dan kualitas produk yang sesuai standarisasi;
3. Memaksimalkan pengendalian dan pengelolaan SIINAS;
4. Mengoptimalkan pengelolaan database tenaga kerja;
5. Peningkatan kompetensi dan penyerapan pencari kerja;
6. Peningkatan Pemahaman pengusaha dan pekerja tentang kebijakan Hubungan Industrial kurang optimal.
7. Melaksanakan koordinasi yang baik antar Bidang maupun instansi terkait dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
8. Adanya dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Rembang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	I.2
1.2 Aspek Strategis Organisasi Perangkat Daerah.....	I.4
1.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	I.4
1.2.2 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	I.5
1.3 Dukungan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah...	I.6
1.3.1 Sumber Daya Manusia.....	I.6
1.3.2 Sarana Prasarana/BMD.....	I.14
1.3.3 Anggaran.....	I.15
1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	I.16
1.5 Dasar Hukum.....	I.25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II.1
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	II.1
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah	II.2
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	II.2
2.4 Struktur Program dan kegiatan Tahun 2025.....	II.3
2.5 Perjanjian Kinerja.....	II.7
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	II.10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III.1
3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	III.2
3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	III.3
3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	III.5
3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III.14
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar	III.15

3.4	Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian sasaran Pemda.....	III.17
3.5	Realisasi Anggaran.....	III.18
3.6	Analisa Efisiensi Anggaran.....	III.28
3.7	Lintas Sektor.....	III.49
BAB IV PENUTUP.....		IV.1
4.1	Kesimpulan.....	IV.1
LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Dinperinnaker Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	I.6
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Dinperinnaker Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	I.9
Tabel 1.3	Sumber Daya Manusia Dinperinnaker Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	I.9
Tabel 1.4	Peta Jabatan Dinperinnaker Kabupaten Rembang.	I.12
Tabel 1.5	Sarana Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Rembang Tahun 2025.....	I.14
Tabel 1.6	Anggaran Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	I.16
Tabel 1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2024..	I.17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	II.1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	II.2
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	II.2
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025.....	II.3
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025....	II.7
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025.....	II.8
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	III.1
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	III.2
Tabel 3.3	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan	III.3
Tabel 3.4	Rumusan Indikator sasaran dan Formulasi Perhitungan.....	III.5
Tabel 3.5	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Sasaran 1.....	III.6

Tabel 3.6	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Sasaran 2	III.12
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.....	III.14
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinperinnaker Kab. Rembang dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar Th 2025.....	III.16
Tabel 3.9	Kontribusi Tujuan dan sasaran Dinperinnaker Kab. Rembang Terhadap Sasaran Pemda.....	III.17
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	III.19
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Anggaran (Tujuan dan Sasaran) Tahun 2025.....	III.29
Tabel 3.12	Inventarisasi Lintas Sektor.....	III.34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	I.2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi DINPERINNAKER Kabupaten Rembang.....	I.4
Gambar 1.3	Data Kepegawaian Menurut Tingkat Pendidikan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025.....	I.7
Gambar 1.4	Data Kepegawaian Dinperinnaker Berdasarkan Klasifikasi PNS dan P3K Tahun 2025.....	I.8
Gambar 2.1	Screenshot Aplikasi Naker Bisa	II.11
Gambar 2.2	Screenshot aplikasi SIINas.....	II.12
Gambar 2.3	Screenshot Aplikasi XStar.....	II.13
Gambar 2.4	Screenshot Aplikasi SIAPkerja.....	II.14
Gambar 2.5.	Screenshot Aplikasi Skillhub.....	II.14
Gambar 3.1.	Rekap Dokumentasi Kegiatan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025	III.31

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

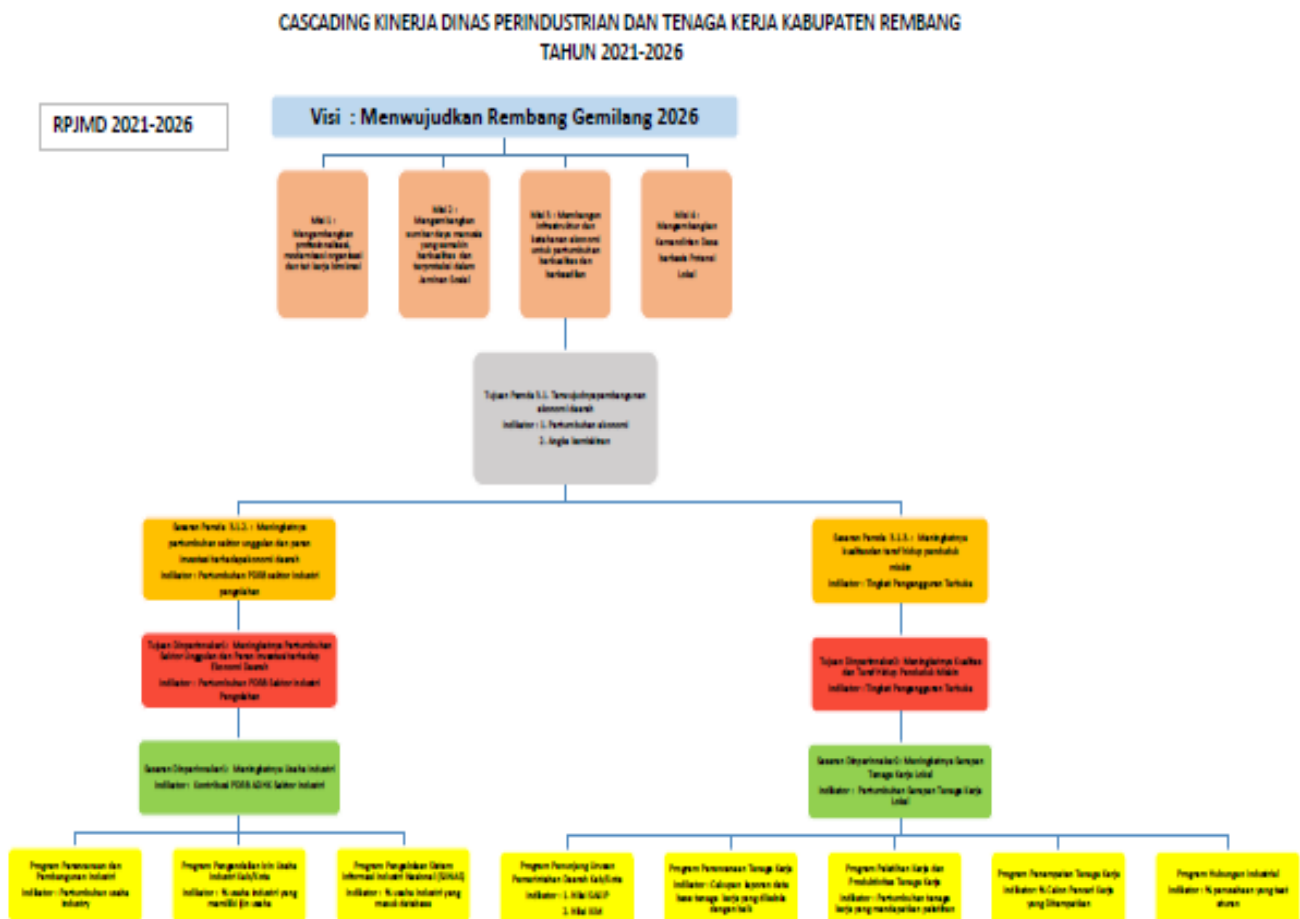
Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.1. Cascading dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Skema kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang yang mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 *Cascading* Kinerja



Sumber: Renstra DINPERINNAKER 2021-2026

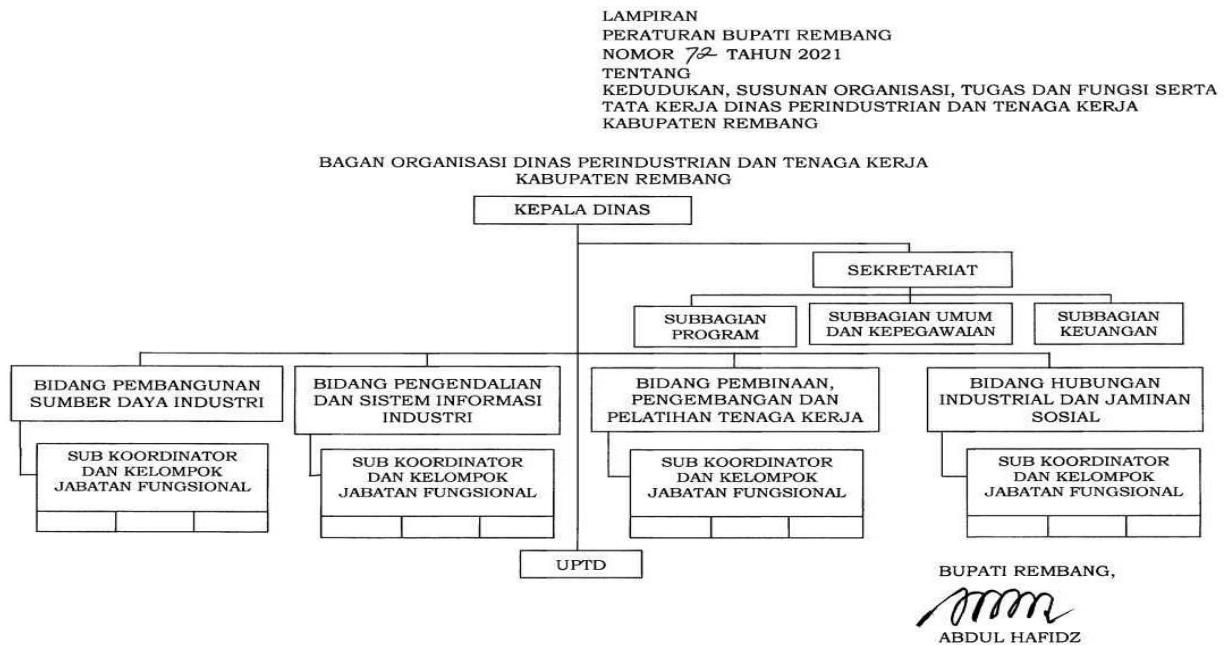
Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten rembang no 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang:

Gambar 1. 2
Struktur Organisasi DINPERINNAKER Kabupaten Rembang



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021

1.2 Aspek Strategis Organisasi Perangkat Daerah

1.2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan layanan dan fasilitas yang ada kaitannya dengan segala urusan perindustrian dan tenaga kerja untuk masyarakat Kabupaten Rembang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan dua urusan yaitu urusan pemerintahan pilihan perindustrian dilaksanakan oleh bidang pembangunan sumber daya industri dan bidang pengendalian dan sistem informasi industri sedangkan urusan pemerintahan wajib tenaga kerja dilaksanakan oleh bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Dalam menyelenggarakan kedua urusan tersebut, Dinperinnaker Kabupaten Rembang dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang efektif, serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Rembang melalui penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kontribusi sektor perindustrian untuk kesejahteraan masyarakat

1.2.2. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dilaksanakan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja didasarkan pada beberapa aspek yaitu: analisa internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan bidang perindustrian dan tenaga kerja, isu KLHS yang relevan maupun isu lingkungan dinamis yang relevan baik global, nasional maupun regional. Sehingga dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perindustrian dan tenaga kerja serta memperhatikan aspek lain tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Perindustrian
 - a. Masih rendahnya produk IKM yang memenuhi standarisasi
 - b. Belum optimalnya inovasi teknologi industri
 - c. Belum meratanya persebaran industri di Kabupaten Rembang
 - d. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri yang meliputi pengelolaan lingkungan, Kawasan industri lahan industri dan prasarana penunjang
 - e. Belum optimalnya keterbukaan sektor industri dengan sektor lainnya.
 - f. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor

2. Urusan Bidang Tenaga Kerja
 - a. Tingginya angka pengangguran
 - b. Rendahnya keterampilan tenaga kerja
 - c. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja

1.3 Dukungan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

1.3.1. Sumber Daya Manusia

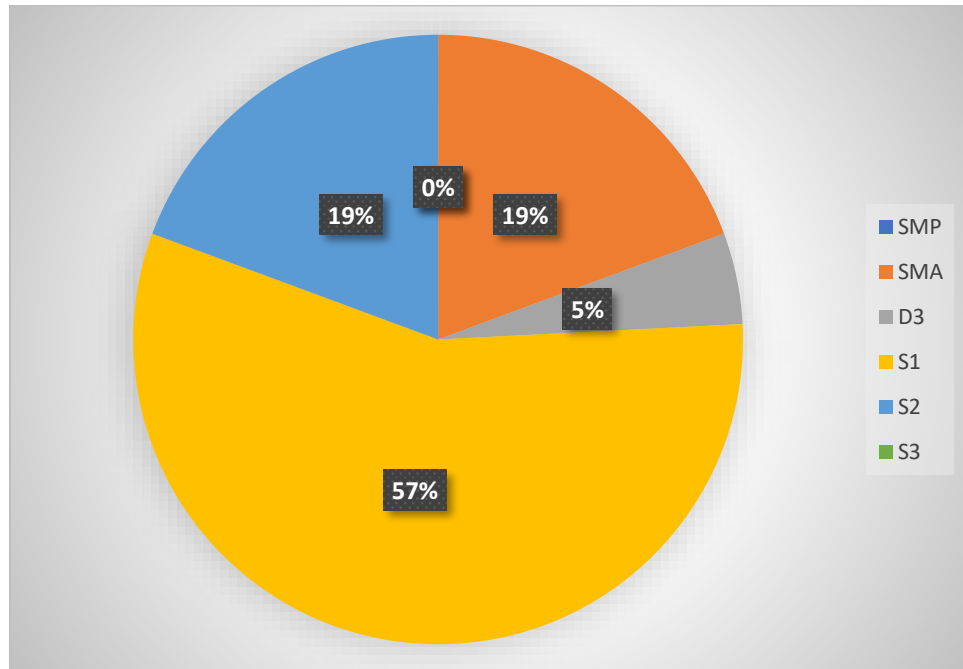
Sumber Daya Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 berjumlah 62 orang, dengan jumlah PNS sebanyak 45 orang dan P3K 17 orang. Secara lebih rinci Sumber Daya Kepegawaian Dinperinnaker Kabupaten Rembang menurut klasifikasi PNS dan P3K, jenis kelamin serta Tingkat Pendidikan dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinperinnaker Kabupaten Rembang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		P3K		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	2	1	8	1	12
3	D3	1	0	1	1	3
4	S1	12	17	1	5	35
5	S2	6	6	0	0	12
6	S3	0	0	0	0	0

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang Desember 2025

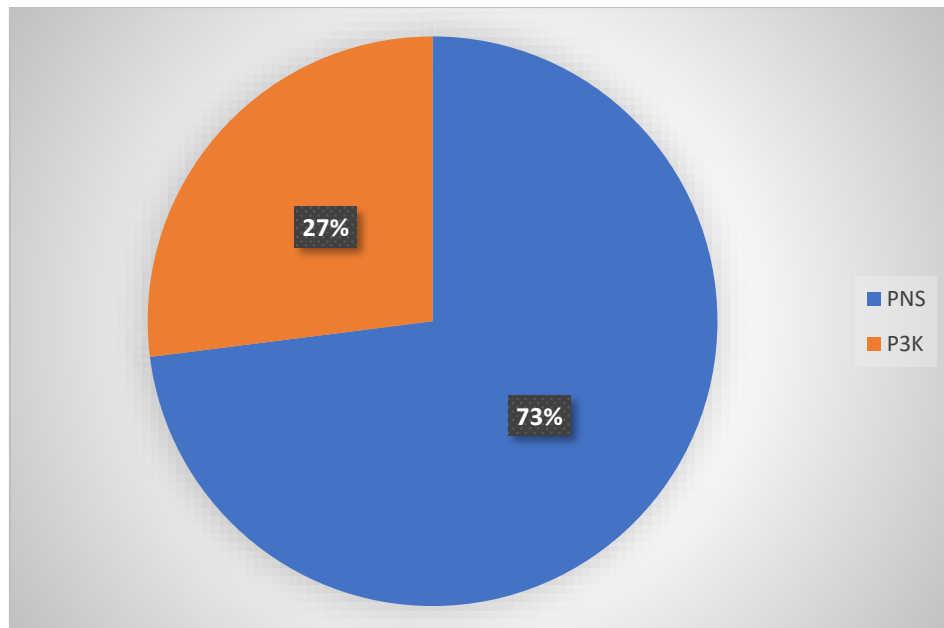
Gambar 1.3
Data Kepegawaian Menurut Tingkat Pendidikan
Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025



Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

Dari Tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa pegawai Dinperinnaker Sebagian besar memiliki Pendidikan terakhir S1 sebanyak 35 orang (57 %), lalu SMA/ sederajat sebanyak 12 orang (19%), kemudian Pendidikan S2 sebanyak 12 orang (19%), D3 sebanyak 3 orang (5%) sedangkan untuk Pendidikan SMP dan S3 belum ada (0%). Dari data tersebut Dinperinnaker masih perlu untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDM kepegawaian, karena beberapa potensi industri dan peningkatan SDM pencari kerja serta tenaga kerja perlu SDM pengelola yang handal dan berkompeten.

Gambar 1.4
Data Kepegawaian Dinperinnaker
Berdasarkan Klasifikasi PNS dan P3K Tahun 2025



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang

Sedangkan jika dilihat dari klasifikasi Jumlah pegawai PNS dan P3K, perbandingan pegawai PNS dan P3K Dinperinnaker Kabupaten Rembang terpaut jauh. Jumlah PNS sebanyak 45 orang (73%) sedangkan pegawai P3K berjumlah 17 orang (27%). Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. Sehingga komposisi pegawai Dinperinnaker sudah sesuai dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu diharapkan seluruh pegawai Dinperinnaker dalam meningkatkan kinerja dalam bekerja.

Sumber daya kepegawaian Dinperinnaker berdasarkan golongan tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Dinperinnaker Kabupaten Rembang
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

PNS/ P3K	Golongan	L	P	Jumlah
2	3	4	5	5
PNS	Golongan I	0	0	0
	Golongan II	1	0	1
	Golongan III	17	20	37
	Golongan IV	3	4	7
P3K	Golongan V	8	1	9
	Golongan VII	1	1	2
	Golongan IX	1	5	6

Sumber: Dinperinnaker Kabupaten Rembang Desember 2025

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar PNS Dinperinnaker merupakan PNS Golongan III sebanyak 37 orang, kemudian Golongan IV sebanyak 7 orang, dan Golongan II sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk P3K, golongan V berjumlah 9 orang, Golongan VII berjumlah 2 orang dan golongan IX sebanyak 6 orang.

Adapun sumberdaya kepegawaian berdasarkan jabatan tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Dinperinnaker Kabupaten Rembang
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
			L	P	
1	2	3	4	5	6
A	Jabatan Struktural		4	7	11
1	Eselon IIb	14	1		1
2	Eselon IIIa	12		1	1

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
			L	P	
1	2	3	4	5	6
3	Eselon IIIb	11	2	2	4
4	Eselon IVa	9	1	3	4
5	Eselon IVb	8		1	1
B	Jabatan Fungsional tertentu		13	10	23
	- Pranata Komputer Pertama	8	1		1
	- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8		1	1
	- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9		2	2
	- Pengantar Kerja Ahli Muda	10	1	2	3
	Pengantar Kerja Ahli Pertama -	8		1	1
	- Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10	1		1
	Mediator Hubungan Industrial - Ahli Pertama	8		1	1
	- Instruktur Mahir	7	1		1
	- Instruktur Pertama	8	3	3	6
	- Instruktur Penyelia	8	1		1
	- Instruktur Muda	10	5		5
C	Jabatan Fungsional umum		4	7	11
	- Pengadministrasi Keuangan	5	1		1
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1	2
	- Pramu Bakti	5			0
	- Penata Keuangan	7		1	1
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7		1	1
	- Analis Bahan Persyaratan Kerja	7		1	1

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
			L	P	
1	2	3	4	5	6
	- Analis Bahan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	7		1	1
	- Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7	1		1
	- Analis Model Pengembangan Industri	7	1		1
	- Analis Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis	7		1	1
	- Analis Tenaga Kerja	7		1	1
D	PPPK		10	7	17
	- Pranata Komputer Ahli Pertama		1	1	2
	- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama			2	2
	- Penata Layanan Operasional			2	2
	- Pengadministrasi perkantoran		2	1	3
	Operator Layanan operasional		6		6
	Pengelola Layanan Operasional		1	1	2
	Jumlah		30	32	62

Sumber: *Dinperinnaker Kabupaten Rembang*

Dari data pada Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa Jumlah total pegawai ASN yang tercatat dalam struktur jabatan sebanyak 62 orang, yang terbagi ke dalam tiga kategori utama: jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Pegawai dengan jabatan struktural berjumlah 11 orang atau sekitar 17,74% dari total ASN. Rinciannya terdiri dari 1 orang pejabat Eselon Iib (kelas jabatan 14), 1 orang Eselon IIIa (kelas jabatan 12), 4 orang Eselon IIIb (kelas jabatan 11), 4 orang Eselon IVa (kelas jabatan 9), dan 1 orang eselon IVb kelas jabatan 8.

Struktur ini menunjukkan keberadaan jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang cukup untuk mendukung fungsi manajerial dan pengambilan keputusan di lingkungan Dinperinnaker.

Untuk jabatan fungsional tertentu, terdapat 23 orang atau 37,10% dari total ASN. Jabatan ini diisi oleh pranata komputer pertama (kelas jabatan 8) 1 orang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama (kelas jabatan 8) 1 orang, Perindustrian dan Perdagangan Muda (kelas jabatan 9) 2 orang, Pengantar Kerja Ahli Muda (Kelas jabatan 10) 3 orang, Pengantar Kerja Ahli Pertama (kelas jabatan 8) 1 orang.

Sementara itu, jabatan fungsional umum diisi oleh 11 orang ASN atau 25,58% dari total, yang diisi oleh pengadministrasi keuangan, pengadministrasi umum, penata keuangan, analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, analisis bahan persyaratan kerja, analisis bahan kelembagaan dan Kerjasama hubungan industrial, analisis bahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, analisis model pengembangan industry, analisis bimbingan teknis dan bantuan teknis, analisis tenaga kerja. Dari jabatan fungsional umum tersebut, semuanya diisi oleh 1 (satu) personal kecuali pengadministrasi umum diisi oleh 2 (dua) orang. Posisi ini berperan penting dalam mendukung operasional dan fungsi administratif lembaga. Dari jabatan fungsional umum yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, semua jabatan sudah terisi walaupun belum sesuai kebutuhan, hanya jabatan pramu bakti yang belum terisi. Sehingga dapat dipastikan bahwa operasional Dinperinnaker sudah cukup ideal dalam menyelesaikan administrasi perkantoran.

Tabel 1.4

Peta Jabatan Dinperinnaker Kabupaten Rembang

No	Jabatan	Bezzeting	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	a. Eselon II	1	1	-
	b. Eselon III	6	6	-
	c. Eselon IV	5	5	-

No	Jabatan	Bezzeting	Kebutuhan	Kekurangan
2	Fungsional Umum			
	a. Penelaah teknis kebijakan	7	17	10
	b. Penata layanan operasional	2	4	2
	c. Pengolah data dan informasi	-	13	13
	d. Pengadministrasi perkantoran	2	12	9
	e. Operator layanan operasional	-	18	18
3	Fungsional Tertentu			
	a. Pranata computer ahli pertama	1	4	3
	b. Arsiparis penyelia	-	1	1
	c. Analisis kebijakan ahli pertama	-	2	2
	d. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan ahli pertama	1	5	4
	e. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan ahli muda	2	5	3
	f. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan ahli madya	-	1	1
	g. Instruktur pelaksana lanjutan/ mahir	1	2	1
	h. Instruktur penyelia	1	2	1
	i. Instruktur ahli pertama	6	10	4
	j. Instruktur ahli muda	6	10	4
	k. Instruktur ahli madya	-	1	1
	l. Pengantar kerja ahli pertama	1	3	2
	m. Pengantar kerja ahli muda	2	5	3
	n. Mediator Hubungan Industrial ahli pertama	1	2	1
	o. Mediator hubungan industrial ahli muda	1	4	3
	Jumlah	45	132	87

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa struktur SDM Dinperinnaker saat ini yang sudah tercukupi hanyalah pada Jabatan Struktural, untuk jabatan Fungsional umum masih terdapat kekurangan personal sejumlah 53 orang, sedangkan untuk Jabatan Fungsional tertentu masih terdapat kekurangan 34 personil. Sehingga kekurangan keseluruhan pegawai sebanyak 87 orang, hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang

sebagai pelaksana urusan pemerintahan wajib bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang perindustrian. Namun demikian dengan koordinasi dan etos kerja yang baik, penugasan dapat terlaksana dengan optimal.

1.3.2. Sarana Prasarana/BMD

Dalam menyelenggarakan pelayanannya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang didukung sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tupoksi maupun sebagai penunjang. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah:

Tabel 1. 5.
Sarana Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kab Rembang Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH BARANG/ UNIT	KONDISI			NILAI ASET (RP)	
			BAIK	RUSAK			
				R	RS		RB
1	PERALATAN MESIN	671	671				3.118.987.111
1.1	alat besar	5	5				15.495.200
1.2	alat angkutan	15	15				30.770.727
1.3	alat bengkel dan alat ukur	102	102				560.500.500
1.5	alat kantor dan rumah tangga	400	400				837.804.691
1.6	alat studio, komunikasi dan pemancar	13	13				82.964.960
1.8	alat laboratorium	14	14				44.175.000
1.10	komputer	122	122				847.276.033
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	21	16			5	2.354.105.284
2.1	bangunan gedung	21	16			5	2.354.105.284
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	5	5				224.223.000
3.1	jalan dan jembatan	1	1				15.000.000
3.2	bangunan air	1	1				199.139.000
3.3	INSTALASI	1	1				5.084.000

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH BARANG/ UNIT	KONDISI			NILAI ASET (RP)
			BAIK	RUSAK		
				R	RS	
3.4	JARINGAN	2	2			5.000.000
6	ASET LAINNYA					49.506.000
6.1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA					-
6.1.1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga					-
6.2	ASET TIDAK BERWUJUD	1	1			49.506.000
6.2.1	Aset Tidak Berwujud	1	1			49.506.000
	JUMLAH	698	698			5.746.821.396

Sumber: Data Aset Tetap Dinperinnaker 2025

Aset tetap terdiri dari 698 unit, dengan rincian peralatan dan mesin 671 unit, gedung dan bangunan 21 unit, jalan irigasi dan jaringan 5 unit, aset lainnya 1 unit. Aset dalam kondisi baik dan rusak terutam aset bangunan dan gedung yang rusak berat sehingga perlu dilakukan pemeliharaan atau renovasi. Kebutuhan ruangan kantor relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang kantor dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain lain sudah tersedia dalam kondisi baik dan ada beberapa yang perlu pemeliharaan.

1.3.3. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang:

Tabel 1.6

Anggaran Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			INDUK (Rp)	Tahun 2025	
		INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
(1)	(1)		(2)		(3)	(4)	
5	BELANJA DAERAH						
5.1	Belanja operasi	7.971.092.000	8.395.196.932	424.104.932	7.166.192.804	6.886.475.902	(279.716.902)
5.1.01	Belanja pegawai	4.700.707.000	5.166.200.105	465.493.105	5.274.765.429	5.413.147.527	138.382.098
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.270.385.000	3.228.996.827	(41.388.173)	1.891.427.375	1.473.328.375	(418.099.000)
5.2	Belanja modal	5.000.000	31.900.000	26.900.000	53.310.000	53.310.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	31.900.000	26.900.000	53.310.000	53.310.000	0
	Jumlah Belanja	7.976.092.000	8.427.096.932	451.004.932	7.219.502.804	6.939.785.902	(279.716.902)

Sumber: DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang 2024-2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2024 anggaran induk sebesar **Rp. 7.976.092.000,00** dan **anggaran pergeseran sebesar Rp. 8.427.096.932,00**. Tahun 2025 anggaran induk sebesar **Rp 7.219.502.804,00** dan anggaran perubahan sebesar **Rp. 6.939.785.902,00**. Dibandingkan tahun 2024 anggaran Dinperinnaker tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan efisiensi anggaran dan keterbatasan finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Nomor 700/002.e/LHE/INSP/2025 Tanggal 17 Juni 2025, berikut dapat disampaikan matrik tindak lanjut yang telah disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Rembang.

Tabel 1.7.
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinperinnaker
Kabupaten Rembang Tahun 2024

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	6	7	8
1.	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi terkait penerbitan pedoman penyusunan dokumen rencana aksi	Koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/18DV8unuSFIt7PRcdIknXQsPDBetufqBC/view?usp=sharing
2.	Memastikan penyusunan pohon kinerja agar disusun dengan penjabaran kerangka logis yang menjelaskan jika-maka, sebab akibat dan mendukung pencapaian kinerja utama	Menyusun pohon kinerja	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1zLKjoepefHR5CBFGAczM9b1W9xgiwC_2/view?usp=sharing
3.	Agar semua dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan melalui website Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Mengupload dokumen perencanaan kinerja	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1jokA3awAKoNk0icAfgktTETdj0eEG49E/view?usp=sharing
					https://drive.google.com/file/d/11Cpf5dXUIR52IANjSFCmZuMXXtSjkUGp/view?usp=sharing

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	6	7	8
4.	Memastikan keselarasan sasaran perangkat daerah antara dokumen pohon kinerja dengan IKU perangkat daerah	Menyusun IKU sesuai dengan pohon kinerja	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/13d8jusSCHISekPUs5r1HU1vgXem-bJLT/view?usp=sharing
					https://drive.google.com/file/d/1zLKjoepfHR5CBFGAczM9b1W9xgiwC_2/view?usp=sharing
5.	Memastikan kembali penyusunan penjenjangan karier/cascading agar mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, yang dapat menggambarkan pembagian kinerja pada setiap level jabatan.	Menyusun cascading yang sesuai dengan regulasi	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/18I1i1kHoGXpZMIQZ5NIitf3HJcnPXBEb/view?usp=sharing
6.	Memastikan kembali penetapan indikator kinerja pada Renstra tahun 2025-2029 dan profil indikator kinerja setiap level kinerja secara detail melalui definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data	Menyusun Indikator Kinerja secara detail	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1jokA3awAKoNk0icAfgktTETdj0eEG49E/view?usp=sharing

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	6	7	8
	informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART				
7.	Menggunakan dokumen Renja sebagai acuan dalam penetapan anggaran terhadap kinerja yang akan dicapai serta menyelaraskan indikator dan target kinerja dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Perangkat Daerah	Dokumen Renja sebagai acuan dalam menetapkan anggaran	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/11Cpf5dXUIR52IANjSFCmZuMXXtSjkUGp/view?usp=sharing
8.	Memastikan aktivitas yang dilaksanakan serta kinerja individu mendukung kinerja organisasi dengan menyelaraskan substansi dokumen rencana kinerja tahunan, rencana aksi, perjanjian kinerja dan SKP	Menyelaraskan aktivitas kinerja individu dengan rencana kinerja	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1SfkUIuVYRx4W3IILpEGtjg2i5kNnZp-j/view?usp=sharing
			Selesai		https://drive.google.com/file/d/1SfkUIuVYRx4W3IILpEGtjg2i5kNnZp-j/view?usp=sharing

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	6	7	8
9.	Agar proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja melibatkan pejabat struktural	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja melibatkan pejabat struktural	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1jokA3awAKoNk0icAf_gktTETdj0eEG49E/view?usp=sharing
10.	Melakukan koordinasi dengan instansi pengampu (Bagian ADPEM Setda) untuk dilakukannya pendampingan pembuatan pedoman teknis yang memuat pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, dasar, tujuan, manfaat, proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab yang dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per -PK, jadwal monev pengukuran kinerja sesuai renaksi	Melakukan koordinasi dengan Bagian Pemeintahan melakukan pendampingan membuat pedoman teknis ang memuat pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, dasar, tujuan, manfaat, proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab yang dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per -PK, jadwal monev pengukuran kinerja sesuai renaksi	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/142ei-ivFuNmKZmxp6E6c1v9YMLgHrMP/view?usp=sharing
					https://docs.google.com/document/d/13J_bjX_4aS_V73DXhUXcHo0-GQrQPEUEk/edit?usp=sharing&ouid=106181096460767572258&rtpof=true&sd=true

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	6	7	8
11.	Agar profil indikator kinerja yang sudah ada dilengkapi dengan formulasi pada setiap kegiatan	Melengkapi profil indikator kinerja dengan formulasi pada setiap kegiatan	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1MPeyTiP_k0Z9Z2j9H8CpI5GCm9RKdHxD/view?usp=sharing
12.	Agar evaluasi triwulanan dilakukan dengan memperhatikan dokumen renaksi dan profil indikator kinerja yang didokumentasikan secara tertib serta melengkapi dokumen Renaksi 2025 sampai dengan sub kegiatan	Melengkapi dokumen Renaksi 2025 sampai sub kegiatan	Dalam proses	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/19Th9KrPm7UhCLPPcS1r0HVqKVepzhJDk/view?usp=sharing
13.	Agar rencana aksi yang telah disusun untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan kinerja triwulanan oleh masing-masing unit kerja (sekretariat dan bidang)	Menyusun tindaklanjuti laporan kinerja triwulanan oleh masing-masing unit kerja (sekretariat dan bidang)	Selesai	Sekretaris	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlkwo9LmL_Hm4lqAYsRXeZBmZitAxFWy/edit?usp=sharing&ouid=106181096460767572258&rtpof=true&sd=true
14.	Agar laporan kinerja diupload pada website Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Mengupload laporan kinerja di website Dinas	LKjIP	Sekretaris	https://dinperinnaker.rembangkab.go.id/lkkip-2024-dinperinnaker-rembang/
			RENJA		https://dinperinnaker.rembangkab.go.id/renja-2024-dinperinnaker-rembang/

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	6	7	8
			RENSTRA		https://dinperinnaker.rembangkab.go.id/renstra-2021-2026-dinperinnaker-rembang/
15.	Agar pelaporan kinerja Dinperinnaker menyajikan informasi perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya 2023,2022 yang disertai dengan analisa penjelasannya	Membandingkan kinerja dengan tahun sebelumnya 2023,2022 yang disertai dengan analisa penjelasannya	Dalam proses	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1jaLQGKwbJR6xzdWAWGSTPie2WSYVLPWM/view?usp=sharing
16.	Agar laporan kinerja menjadi perhatian dalam membuat strategi peningkatan kinerja dimasa mendatang	Akan memperhatikan dalam membuat strategi laporan kinerja peningkatan dimasa mendatang	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1jaLQGKwbJR6xzdWAWGSTPie2WSYVLPWM/view?usp=sharing
17.	Agar data dan informasi laporan kinerja berkala (triwulanan/semesteran) dijadikan acuan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja tahun berikutnya	Laporan kinerja berkala untuk dijadikan acuan dalam mencapai kinerja tahun berikutnya	Selesai	Sekretaris	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlkwo9LmLHm4lqAYsRXeZBmZitAxFWy/edit?usp=sharing&ouid=106181096460767572258&rtpof=true&sd=true
18.	Agar strategi atau rekomendasi yang ditetapkan dalam dokumen LKjIP bab IV dijadikan sebagai acuan perencanaan kinerja dalam dokumen Renja	strategi atau rekomendasi yang ditetapkan dalam dokumen LKjIP bab IV dijadikan sebagai acuan	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1jaLQGKwbJR6xzdWAWGSTPie2WSYVLPWM/view?usp=sharing

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	6	7	8
		perencanaan kinerja dalam dokumen Renja			
19.	Nilai efisiensi dan aktifitas kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan pada tabel 3.8 Laporan Kinerja Dinas tahun 2024 agar dilengkapi dengan analisis secara detail	Akan melengkapi tabel 3.8 Laporan Kinerja Dinas tahun 2024 dengan analisis secara detail	Dalam proses	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1jaLQGKwbJR6xzdWAWGSTPie2WSYVLPWM/view?usp=sharing
20.	Agar evaluasi internal dilakukan secara mendalam dengan keterlibatan pimpinan dan asesor atau tim yang kompeten dan diadministrasi secara tertib	Akan melakukan evaluasi internal secara mendalam dengan keterlibatan pimpinan dan asesor atau tim yang kompeten dan diadministrasi secara tertib	Dalam proses	Sekretaris	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlkwo9LmL_Hm4lqAYsRXeZBmZitAxFWy/edit?usp=sharing&ouid=106181096460767572258&rtpof=true&sd=true
21.	Membuat/ mengembangkan inovasi-inovasi sebagai upaya mendorong percepatan pencapaian kinerja PD	Mengembangkan inovasi yang ada	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/16QYriQoCvjGGGy80bxGffUTcT5ORH_Tg/view?usp=sharing

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
1	2	3	6	7	8
22.	Sebagai upaya perbaikan agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal digunakan untuk perbaikan capaian output/ outcome kinerja PD	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal digunakan untuk perbaikan capaian output/ outcome kinerja PD	Selesai	Sekretaris	https://drive.google.com/file/d/1AeSeBt5Rf0J-MvZLHoNPFIR_xHPT5Xnu/view?usp=sharing

Kolom 2. saran dan rekomendasi berdasarkan LHE SAKIP PD tahun 2024

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Rembang nomor 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
9. Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2025 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah
10. Surat Edaran Sekda nomor 000.8.6.3/5792/2025, tanggal 29 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencan Aksi Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai cascade kinerja tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah (3.1.2) dan Meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin (3.1.3). Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang selama lima tahun adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dalam waktu lima tahun dijabarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Dinperinnaker Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,67	4,75	4,6	4,5	4,3	4,0	4,0
1.	1.1. Sasaran: Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	NA	5	7	10	12	15	15
3.	2. Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	4,23	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5
4.	2.1. Sasaran: Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun Rupiah	3,2	3,15	3,18	3,2	3,23	3,25	3,25

2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinperinnaker Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,6	4,5	4,3	4,0
2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
3.	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	5	7	10	12	15
4.	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun Rupiah	3,15	3,18	3,2	3,23	3,25

Sumber: Renstra Dinas Perinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinperinnaker Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

No	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Usaha Industri	Pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap tenagakerja	Pengembangan industri pengolahan dan Peningkatan dukungan penguatan SDM industri

No	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
2	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	<p>Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri</p> <p>Pengembangan inovasi teknologi produksi</p> <p>Standarisasi produk IKM</p> <p>Pengembangan bahan baku industri substitusi impor</p> <p>Integrasi sektor pendukung industry</p> <p>Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja</p> <p>Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan</p>	<p>Peningkatan daya saing produk industri</p> <p>Pengembangan, penguasaan teknologi dan inovasi</p> <p>Fasilitasi Standarisasi produk IKM</p> <p>Penguatan pasokan bahan baku industri</p> <p>Peningkatan koordinasi lintas sektor</p> <p>Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan sertifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja</p> <p>Meningkatkan dan membina kewirausahaan pemuda secara sinergis dengan segenap pemangku kepentingan terkait</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan</p>

Sumber : Renstra Dinas Perinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.4.
Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang (+/-)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.799.502.804	5.964.785.902	165.283.098
			Kegiatan:			
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	0

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/berkurang (+/-)	
			a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	0
			b	Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	0
			c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	500.000	0
			d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	0
			e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	0
			2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.419.089.429	5.495.867.527	76.778.098
			a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.274.765.429	5.413.147.527	76.778.098
			b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.820.000	81.220.000	(61.600.000)
			c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	0
			d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000	500.000	0
			3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000	500.000	0
			a	Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	500.000	500.000	0
			4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	9.275.000	7.275.000
			a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	500.000	7.775.000	7.275.000
			b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000	500.000	0
			c	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000	500.000	0
			d	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000	500.000	0
			5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.180.000	106.470.000	(12.710.000)
			a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	8.000.000	1.000.000
			b	Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga	4.000.000	8.000.000	4.000.000
			c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	11.000.000	1.000.000
			d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	18.119.000	3.119.000
			e	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	30.420.000	28.341.000	(2.079.000)
			f	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	14.777.000	(223.000)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/berkurang (+/-)	
			g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsolidasi SKPD	36.760.000	17.233.000	(19.527.000)
			h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	1.000.000	0
			6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	40.000.000	0
			a	Pengadaan Mebel	1.000.000	0	0
			b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	40.000.000	0
			7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.837.375	243.412.375	143.425.000
			a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	0
			b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.600.000	106.600.000	0
			c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.937.375	142.512.375	76.575.000
			8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.900.000	65.261.000	
			a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000	18.000.000	0
			b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.900.000	21.120.000	1.220.000
			c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	26.141.000	16.141.000
			II.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	15.000.000	15.000.000	0
			1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	15.000.000	15.000.000	0
			a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	15.000.000	15.000.000	0
			III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	195.000.000	130.000.000	(65.000.000)
			1.	Konsultansi Produktifitas pada Perusahaan Kecil	195.000.000	130.000.000	(65.000.000)
			a	Pelaksanaan Konsultansi Produktifitas pada Perusahaan Kecil	195.000.000	130.000.000	(65.000.000)
			IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	420.000.000	305.000.000	(115.000.000)
			1.	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	420.000.000	305.000.000	
			a	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	300.000.000	300.000.000	0
			b	Perluasan Kesempatan Kerja	120.000.000	5.000.000	(115.000.000)
			V.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	470.000.000	325.000.000	(145.000.000)
			1.	Pengesahana Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten Kota	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang (+/-)
			a Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
			2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	370.000.000	275.000.000	(95.000.000)
			a Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	370.000.000	275.000.000	(95.000.000)
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatnya Usaha Industri	III PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15.000.000	15.000.000	0
			1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	0
			a Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.000.000	15.000.000	0
			IV PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
			1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)			
			a Koodinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
			V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	205.000.000	135.000.000	(70.000.000)
			1. Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI,IPUI,IUKI dan IPKI	205.000.000	135.000.000	(70.000.000)
			a Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang (+/-)
			b Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	105.000.000	85.000.000	(20.000.000)
			TOTAL	7.219.502.804	6.939.785.902	(279.716.902)

Sumber: DPA Dinperinnaker Kab Rembang Tahun 2025

2.5 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan tertulis yang berisikan penugasan dari pemberi amanah (atasan langsung) dengan penerima amanah (bawahan langsung) yang memuat target kinerja terukur, indikator keberhasilan dan komitmen penggunaan sumber daya dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinperinnaker Kabupaten Rembang
Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatkan Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,3
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	2,0
3.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	12
4.	Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun Rupiah	3,23

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.899.502.804	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	15.000.000	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	195.000.000	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	420.000.000	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	470.000.000	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	15.000.000	APBD
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.000.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	205.000.000	APBD
	Jumlah	7.219.502.804	

Sumber: Data Keuangan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinperinnaker Kabupaten Rembang melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinperinnaker Kabupaten Rembang
Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatkan Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,3
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	2,0

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Investasi terhadap Ekonomi Daerah			
3.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	12
4.	Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun Rupiah	3,23

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.964.785.902,-	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	15.000.000	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	130.000.000	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	305.000.000	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	325.000.000	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	15.000.000	APBD
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	50.000.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	135.000.000	APBD
	Jumlah	6.939.785.902	

Sumber: Data Keuangan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang ada pada Dinperinnaker Kabupaten Rembang terdapat instrument pendukung kinerja antara lain;

1. Aplikasi Naker Bisa (Milik Pemkab Rembang)

NakerBisa adalah platform digital yang dirancang khusus untuk seluruh penduduk usia kerja di Kabupaten Rembang, dan mitra pemerintah lain, yakni:

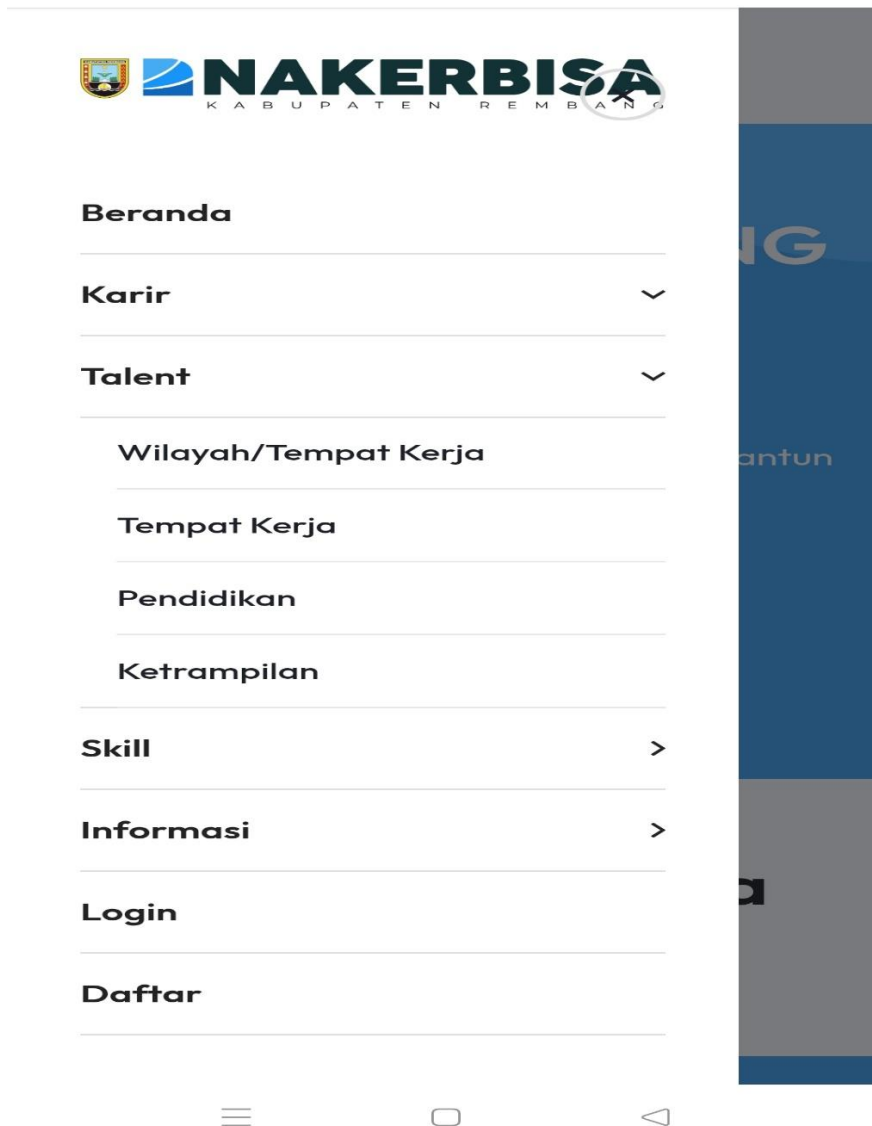
- Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
- Para pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan.
- Perusahaan yang ingin mempublikasikan profil dan membuka lowongan kerja.
- Pengelola LPK/LPKS/BLK/BLKK yang ingin memperluas jangkauan pelatihan.

Aplikasi NakerBisa dapat diakses melalui melalui link berikut:

<https://nakerbisa.rembangkab.go.id>

Gambar 2.1. Screenshoot Aplikasi Naker Bisa





Sumber: Aplikasi Naker Bisa Kabupaten Rembang

2. Aplikasi SIINas (SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional)

Aplikasi SIINas merupakan sistem yang dikembangkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memantau dan mengelola data industri di Indonesia.

- Platform terintegrasi yang mencakup institusi, SDM, basis data, perangkat keras & lunak untuk menyampaikan, mengelola, dan menyebarluaskan data/informasi industri
- Alat pelaporan wajib bagi industri secara digital, menggantikan dokumen fisik
- Dasar hukum: UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 1 ayat (16)
- Semua perusahaan industri dan kawasan industri wajib lapor berkala lewat SIINas

- Sejak Permenperin 13/2025, frekuensi lapor jadi 4x
- Manfaat: Efisiensi pelaporan, integrasi data, pemantauan kinerja real-time, dan jadi dasar pemerintah bikin kebijakan berbasis data

Gambar 2.2. Screenshoot aplikasi SIINas



Sumber: Aplikasi SIINas Kemenperin

The screenshot shows the SIINas interface with a notification and a list of companies:

1 Berkas Permohonan Verifikasi Industri | **0 Perusahaan di Kabupaten Rembang Tidak beroperasi pada triwulan 1 tahun 2026** | **0 berkas Permohonan Verifikasi Kawasan Industri**

Filter Perusahaan
 Nama Perusahaan: KBLI: NIB: Tipe Akun: Industri (A)

▶ Daftar Perusahaan Industri Di Kabupaten Rembang

Export Excel | 234 Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	NIB	Alamat Kantor Pusat	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Industri
1.	CV Duta Ilahi Tgl. Registrasi 2026-03-10 09:11:22	8120012130518	Jl. Dokter Soetomo No.30 RT 002/RW 002, Kutoharjo, Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59211, Telp. 081390775111	Jl. Blora - Rembang Km. 20, Jukung, Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59255, Telp. 081390775111	11051 (industri air kemasan)	Kecil

Sumber: Aplikasi SIINas Kemenperin

3. Aplikasi XStar

Aplikasi XStar adalah aplikasi dari BPH Migas untuk mempermudah penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM subsidi & kompensasi Fungsinya:

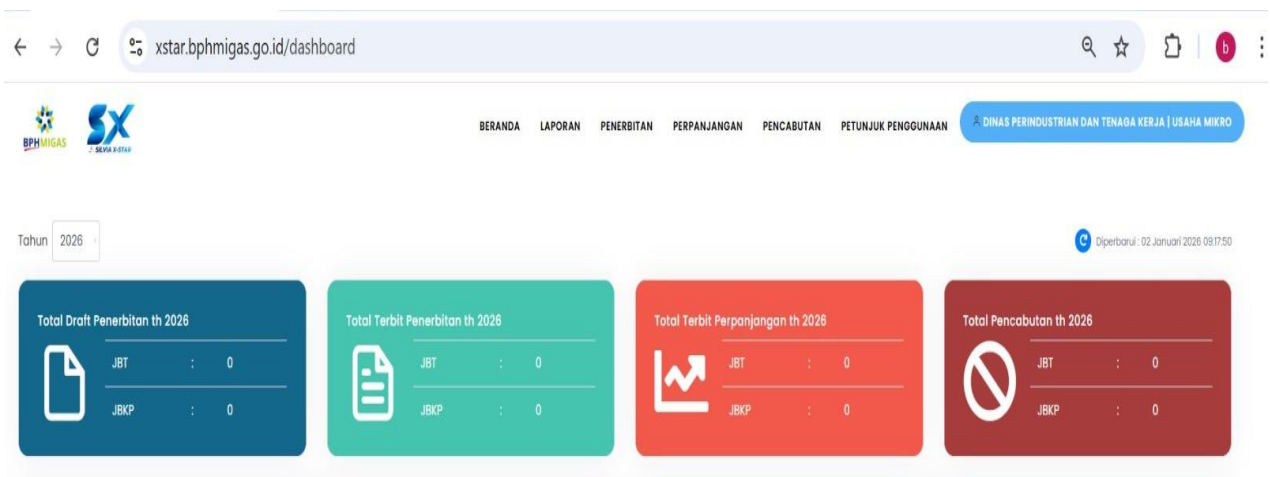
- Dipakai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerbitkan Surat Rekomendasi JBT (Solar subsidi) dan JBKP (Pertalite kompensasi)

Aplikasi Xstar terintegrasi data NIK dengan sistem Pertamina dan AKR, berlaku untuk 1 (satu) NIK tidak bisa duplikasi surat rekomendasi dan Sudah ada formula perhitungan otomatis: jenis alat, kapasitas, dan volume BBM yang dibutuhkan untuk 1-3 bulan.

Yang berhak mendapatkan surat rekomendasi lewat Xstar adalah:

- Industri Mikro
- Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) Sektor Industri
- Menggunakan mesin / alat yang membutuhkan BBM (Solar)

Gambar 2.3. Screenshoot Aplikasi XStar



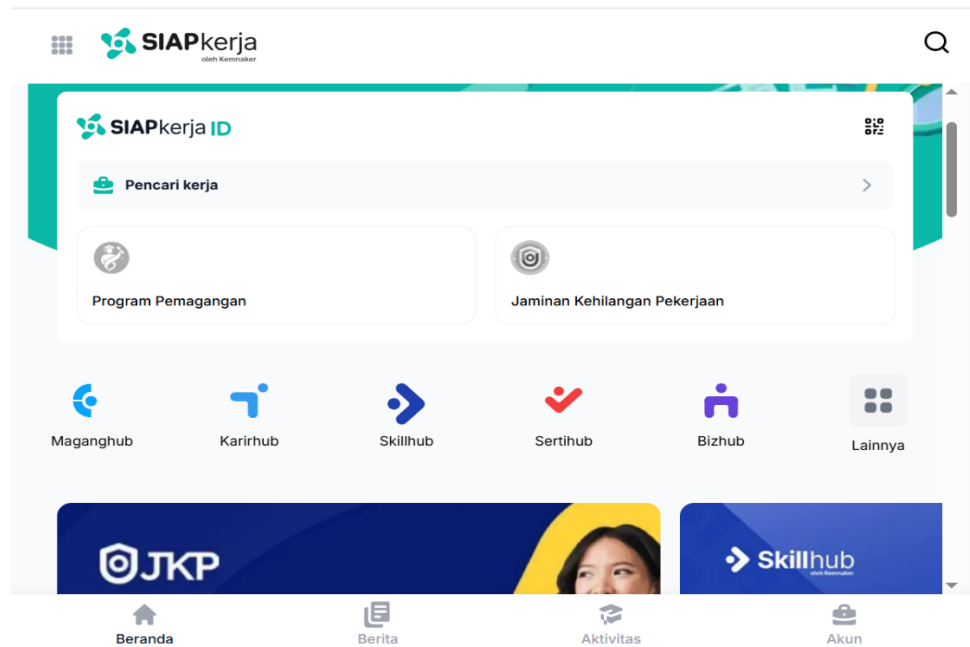
Sumber: Aplikasi Xstar BPH Migas

4. Aplikasi SIAPkerja (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenakerjaan)

Aplikasi SIAPkerja adalah platform digital terintegrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI yang menyediakan layanan ketenagakerjaan lengkap seperti info lowongan (Karirhub), pelatihan (Skillhub), sertifikasi (Sertihub), dan wirausaha (Bizhub) dalam satu akun (SSO) untuk memudahkan pencari kerja dan perusahaan.

Tujuan: Mempermudah masyarakat dalam mencari kerja, meningkatkan kompetensi, dan mendapatkan sertifikasi secara gratis serta online

Gambar 2.4. Screenshoot Aplikasi SIAPkerja

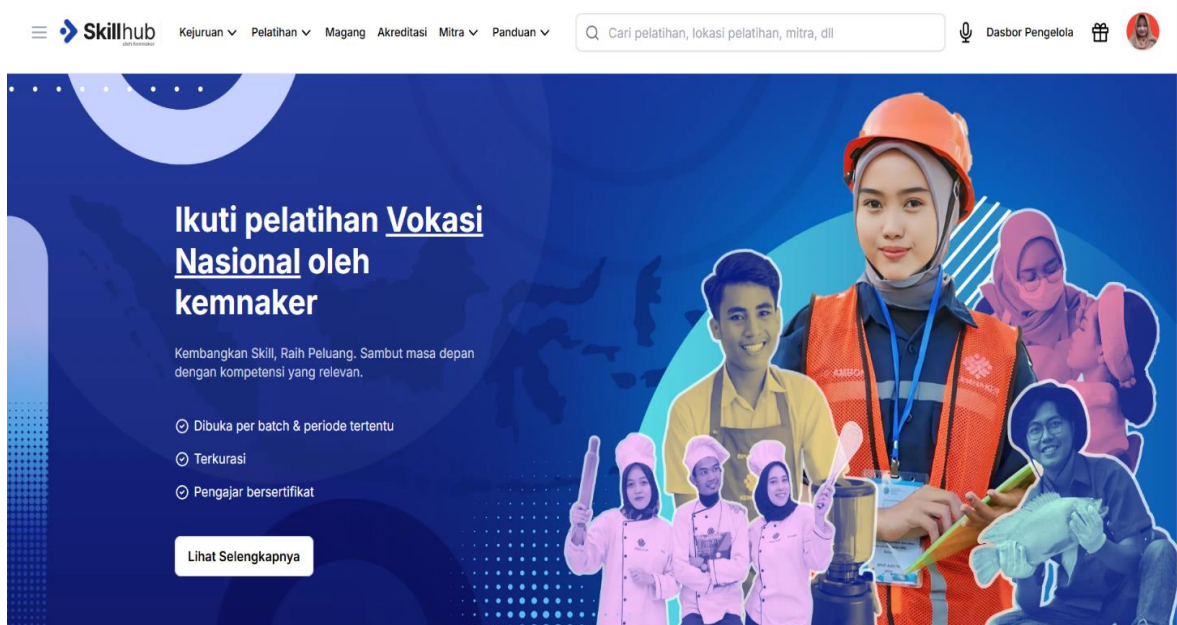


Sumber: aplikasiSIAPKerja ID

5. Aplikasi Skillhub

Skillhub adalah salah satu fitur layanan utama dalam ekosistem digital SIAPkerja dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang difokuskan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia

Gambar 2.5. Screenshoot Aplikasi Skillhub



Sumber: Layanan SKILLhub Kemennaker

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dengan Bupati tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026) (klm. 6:klm.9) x 100%
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,3	2,90	148,28	Sangat tinggi	4,0	137,93
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	2,0	5,47	273	Sangat tinggi	2,5	218,8
3.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	12	-27,32	-227,66	Sangat rendah	15	-182,13
4.	Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun Rupiah	3,23	3,947	122,199	Sangat tinggi	3,25	121,45

Sumber: Laporan capaian kinerja Dinperinnaker Kabupaten Rembang TW I-IV Tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja tujuan Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Sumber data: BPS
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Sumber data: BPS

Analisis Ketercapaian tujuan:

1. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, sebagai berikut:
 - Realisasi tahun 2025 sebesar 2,90 % dari target 4,3% sehingga capaian kinerjanya sebesar 148,28% (terlampau) dengan kriteria penilaian kinerja sangat tinggi
 - Capaian target indikator tahun 2025 terhadap target akhir tahun Renstra (2026): Target tahun 2026 sebesar 4,5%, realisasi tahun 2025 sebesar 2,90% sehingga capaiannya sebesar 137,93% (terlampau), dengan kriteria penilaian kinerja sangat tinggi
 - Realisasi tahun 2025 sebesar 2,90 didapatkan dari data BPS Kabupaten Rembang.
 - Meskipun capaian kinerja TPT tahun 2025 sangat tinggi upaya penciptaan lapangan kerja masih belum sepenuhnya optimal karena pada kenyataannya pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya mismatch keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, kenaikan jumlah

angkatan kerja baru terutama dari lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Sehingga upaya tindaklanjutnya antara lain dengan penguatan pelatihan vokasi dan link and match dengan kebutuhan industri, pengembangan kewirausahaan, pemanfaatan ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, sebagai berikut:

- Realisasi tahun 2025 sebesar 5,47 % dari target 2,0 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 273% (terlampau) dengan kriteria penilaian kinerja sangat tinggi
- Capaian target indikator tahun 2025 terhadap target akhir tahun Renstra (2026) : Target tahun 2026 sebesar 2,5%, realisasi tahun 2025 sebesar 5,47% sehingga capaiannya sebesar 218,8% (terlampau). dengan kriteria penilaian kinerja sangat tinggi
- Realisasi tahun 2025 sebesar 5,47 didapatkan dari data BPS Kabupaten Rembang.
- Capaian ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Rembang mampu tumbuh secara signifikan dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Tingginya realisasi pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas produksi industri, masuknya investasi baru maupun pengembangan industri yang sudah ada, serta membaiknya iklim usaha yang mendukung ekspansi sektor industri. Selain itu, dukungan lintas sektor seperti infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, serta peningkatan permintaan pasar turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Meskipun capaian telah terlampau namun masih diperlukan upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan melalui penguatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas investasi, serta pengembangan sumber daya manusia industri agar pertumbuhan yang dicapai tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rumusan Indikator sasaran dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	Jumlah TK lokal yang dipekerjakan periode sekarang dikurangi jumlah TK lokal yang dipekerjakan periode sebelumnya dibagi jumlah TK lokal yang dipekerjakan periode sebelumnya x 100%
2.	Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Sumber data: BPS

Analisis Ketercapaian Sasaran:

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja Lokal dengan indikator Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal, sebagai berikut:
 - Realisasi tahun 2025 sebesar -27,32% dari target 12% sehingga capaian kinerjanya sebesar -227,66% (sangat rendah)
 - Capaian target indikator tahun 2025 terhadap target akhir tahun Renstra (2026): Target tahun 2026 sebesar 15%, realisasi tahun 2025 sebesar -27,32% sehingga capaiannya sebesar -182,13% (sangat rendah).
 - Realisasi data pertumbuhan serapan tenaga kerja tahun 2025 sebesar -27,32 didapatkan dari data penyerapan tenaga kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025 dibandingkan dengan data tahun 2024.
 - Menurunnya pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal yang sangat rendah dengan nilai -27,32% dari target 12% disebabkan oleh kombinasi antara penurunan jumlah permintaan tenaga kerja di Kabupaten Rembang dengan pesimisme pencari kerja, tingginya migrasi ke luar

daerah akibat selisih upah (UMK) yang lebih menjanjikan juga ikut mempengaruhi. Kondisi ini juga disebabkan oleh absennya agenda Job Fair sebagai akses informasi, serta struktur industri lokal yang masih didominasi permintaan tenaga kerja perempuan sehingga angkatan kerja laki-laki merasa kehilangan peluang dan berhenti mencari kerja di dalam kabupaten.

- Keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal dengan indikator Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM DINPERINAKEK	Nilai	83,69	98,326	117,488
		Nilai SAKIP DINPERINAKEK	Nilai	73	61,31	83,986
	Kegiatan:					
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	93	100%	107,527
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3 dok	100
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	2	2 dok	100
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	2	2 dok	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3 Lap	100
	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12 Lap	100
2	Administrasi Keuangan . Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	96,5	100%	103,627
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	65 org/bulan	130
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12 dok	100
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1 Lap	100
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12 Lap	100
3	Administrasi Barang . Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	95	100%	105,26
	a. Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1 dok	100
4	Administrasi . Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	100%	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
	a. Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1 unit	100
	b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	4	4 dok	100
	c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	1	1 dok	100
	d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	2	2 org	100
5	Administrasi Umum . Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	%	100	100 %	100
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	50 paket	100
	b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30 paket	100
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	20 paket	100
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12 paket	100
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	12	12 paket	100
	f. Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12 paket	100
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12 Lap	100
	h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	1	1 dok	100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	95	95%	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5 unit	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100%	100
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12 Lap	100
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12 Lap	100
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12 Lap	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	%	100	100%	100
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11 unit	100
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11 unit	100
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4 unit	100
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik	%	80%	80%	100
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase peningkatan database tenaga kerja	%	5%	5%	100
	a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dok	1 dok	1 dok	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	65%	65%	100
	1 Konsultasi . Produktifitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5 perusahaan	10 perusahaan	200
	a. Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5 perusahaan	10 perusahaan	200
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	50%	60,71%	121,42
	1 Pelayanan Antar Kerja . di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja	pelayanan	1 pelayanan	1 pelayanan	100
	a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	30 orang	7.280 orang	24.266,67
	b. Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	15 orang	15 orang	100
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	% perusahaan yang taat aturan	%	72%	72%	100
	1 Pengesahana Peraturan . Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten Kota	Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan	BU	50 BU	50 BU	100
	a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	2 laporan	2 laporan	100
	2 Pencegahan dan . Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan	Perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
	a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perusahaan	50 Perusahaan	106 perusahaan	212

2. Meningkatnya Usaha Industri dengan indikator Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri, sebagai berikut :

- Realisasi tahun 2025 sebesar 3,947 trilyun rupiah dari target 3,23 trilyun rupiah sehingga capaian kinerjanya sebesar 122,199% (melampaui)
- Capaian target indikator tahun 2025 terhadap target akhir tahun Renstra (2026): Target tahun 2026 sebesar 3,25 trilyun rupiah, realisasi tahun 2025 sebesar 3,947 trilyun rupiah sehingga capaiannya sebesar 121,45% (melampaui).
- Realisasi data pertumbuhan serapan tenaga kerja tahun 2025 sebesar 3,947 trilyun rupiah didapatkan dari data BPS Kabupaten Rembang.
- Capaian indikator ini menunjukkan bahwa sasaran strategis “Meningkatnya Usaha Industri” telah tercapai dengan sangat baik dan melampaui target. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan kinerja ke depannya agar kontribusi sektor industri dapatterus meningkat secara konsisten, antara lain dengan upaya mengembangkan industri berbasis lokal (Hilirisasi), memperluas akses investasi dan kemitraan usaha dan meningkatkan kualitas SDM industri melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Usaha Industri dengan indikator Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan usaha industri	%	4%	6%	150
	1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya	industri	250 indsutri	145 industri	58
	a. Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dok	1 dok	1 dok	100
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	% usaha industri yang memiliki ijin usaha		25%	90%	360
	1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri sesuai SOP	reko mendasi	66 rekomen dasi	13 rekomendasi	19,69
	a. Koodinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dok	1 dok	1 dok	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% usaha industri yang masuk database	%	65%	3,312 %	5,09
	1 Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI,IPUI,IUKI dan IPKI	Jumlah Database Industri Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola Dengan Baik	databa se	1 databa se	1 database	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
	a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dok	1 dok	1 dok	100
	b. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	dok	1 dok	1 dok	100

3.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Meningkatkan Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5	3,67	136,24	4,75	1,76	269,88	4,6	2,6	176,92	4,5	2,84	158,45	4,3	2,90	148,28
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1	4,23	423	0,5	3,33	666	1,0	6,59	659	1,5	5,61	374	2,0	5,47	273,5
3.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%		-01,96		5	12,09	241,8	7	6,69	95,57	10	28,19	281,9	12	-27,32	-227,67
4.	Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun Rupiah		3,2		3,15	3,344	106,03	3,18	3,544	111,45	3,2	3,743	116,97	3,25	3,947	121,45

Dari tabel 3.7. di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis selama kurun waktu lima tahun hampir keseluruhan tercapai dan melampaui target setiap tahunnya dengan predikat penilaian sangat tinggi. Namun capaian kinerja dengan indikator meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal tahun 2025 mengalami penurunan yang sangat drastis dengan kriteria penilaian kinerja sangat rendah. Realisasi data pertumbuhan serapan tenaga kerja tahun 2025 sebesar -27,32 didapatkan dari data penyerapan tenaga kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025 dibandingkan dengan data tahun 2024. Menurunnya pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal yang sangat rendah disebabkan oleh kombinasi antara penurunan jumlah permintaan tenaga kerja di Kabupaten Rembang dengan pesimisme pencari kerja, tingginya migrasi ke luar daerah akibat selisih upah (UMK) yang lebih menjanjikan juga ikut mempengaruhi. Kondisi ini juga disebabkan oleh absennya agenda Job Fair sebagai akses informasi, serta struktur industri lokal yang masih didominasi permintaan tenaga kerja perempuan sehingga angkatan kerja laki-laki merasa kehilangan peluang dan berhenti mencari kerja di dalam kabupaten.

3.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja pusat/provinsi dan kabupaten daerah sekitar diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinperinnaker Kab. Rembang
dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar Th 2025

No	Indikator	Realisasi th. 2025	Realisasi Nasional th. 2025	Realisasi Provinsi th. 2025	Realisasi Daerah Sekitar			
					Jepara	Kudus	Pati	Blora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,90 %	4,74%	4,66%	3,3%	3,23%	3,71%	3,61%
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,47 %	5,3%	5%	3,62%	-1,16%	6,74%	1,32%
3	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	-27,32%	Null	Null	Null	Null	Null	Null
4	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	3,947 Trilyun Rupiah			8,522 Trilyun Rupiah	55,610 Trilyun Rupiah	10,582 Trilyun Rupiah	2,141 Trilyun Rupiah

Sumber: BPS Republik Indonesia

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2025, capaian Kabupaten Rembang sebesar 2,90% sangat baik jika dibanding capaian Provinsi sebesar 4,66%, Nasional sebesar 4,74% dan kabupaten sekitar (Jepara 3,3%), (Kudus 3,23%), (Pati 3,71%), Blora (3,61%). Hal tersebut berarti bahwa total pada usia kerja di Kabupaten Rembang, terdapat 2,9% yang tidak bekerja. Hal tersebut dicapai salah satunya dari banyaknya Perusahaan padat karya yang berinvestasi di Rembang, tetapi rendahnya angka pengangguran harus tetap ditekan dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi calon pencari kerja agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki produktivitas tinggi.

Pada indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Capaian Kabupaten Rembang sebanyak 5,47% lebih tinggi dibanding capaian Provinsi sebesar 5%, capaian Nasional sebanyak 5,3%, capaian Kabupaten sekitar yakni Kabupaten Jepara (3,62%), Kudus (-1,16) dan Blora (1,32%) tetapi capaian Kabupaten Pati lebih tinggi sebesar 6,74%. PDRB sektor industri pengolahan di kabupaten Rembang memang menjadi kontributor terbesar pada PDRB, sehingga angka pertumbuhannya lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada indikator serapan tenaga kerja lokal untuk capaian provinsi, nasional maupun Kabupaten sekitar tidak diketahui karena tidak menjadi indikator pada RPJMD, RPJMN maupun renstra masing-masing instansi/lembaga. Sedangkan pada indikator Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri, capaian Kabupaten Rembang sebesar Rp. 3,947 T lebih rendah jika dibanding Kabupaten Jepara (Rp. 8,522 T), Kabupaten Kudus (Rp. 55,61 T) dan Pati (Rp. 10,582 T) tetapi capaiannya lebih tinggi dari Kabupaten Blora sebesar Rp. 2,141 T. Capaian tersebut menandakan bahwa produktivitas industri pengolahan di Kabupaten Rembang lebih rendah dibanding Kabupaten Kudus, Jepara dan Pati, karena jumlah Perusahaan industri di Kabupaten tersebut jauh lebih banyak daripada Kabupaten Rembang.

Walaupun capaian pertumbuhannya sudah tinggi, tetapi kontribusi pada PDRB ADHK masih rendah, untuk itu perlu terus ditingkatkan dengan beberapa strategi antara lain meningkatkan stabilitas iklim investasi, pembinaan industri mikro kecil menengah maupun besar, peningkatan produktivitas produk industri dan peningkatan kualitas produk industri.

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian sasaran Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kontribusi Tujuan dan sasaran Dinperinnaker Kab. Rembang Terhadap Sasaran Pemda

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	2,0 %	5,47%	Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,0 %	5,47%
					Sasaran: Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK		

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Sektor Industri	3,23 Trilyun Rupiah	3,947 Trilyun Rupiah
2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3 %	2,90%	Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan taraf hidup penduduk miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3%	2,90%
					Sasaran: Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	12%	-27,32%

Sumber: Laporan kinerja Dinperinaker Kabupaten Rembang tahun 2025

Dari tabel 3.9. di atas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang telah mendukung pemenuhan pencapaian kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Dan dari tabel tersebut kinerja sektor industri sangat tinggi dan melampaui target. Dalam upaya Meningkatkan Kualitas dan taraf hidup penduduk miskin dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka capaian kinerja. juga melampaui target dengan kriteria sangat tinggi menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan. Namun upaya pencapaian kinerja masih terdapat ketimpangan yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, artinya pertumbuhan industri belum sepenuhnya dirasakan oleh tenaga kerja lokal. Upaya yang perlu dilakukan ke depannya adalah:

- Peningkatan kualitas SDM lokal, dengan melaksanakan pelatihan berbasis kebutuhan industri
- Mendorong industri memprioritaskan tenaga kerja lokal
- Link and Match anatar sekolah/BLK dengan kebutuhan industri.

3.5. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Langsung per Sasaran tahun 2025. (menyajikan jumlah dan rincian anggaran serta jumlah dan rincian pengeluaran/ realisasi anggaran beserta persentase penyerapan anggaran).

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan taraf hidup penduduk miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3%	2,90%	148,28%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.964.785.902	5.839.637.674	97,90
2.	Sasaran: Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	12%	-27,32%	-227,67%	Kegiatan:			
						1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	3.625.793	90,64
						a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	867.730	86,77
						b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	450.100	90,02
						c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	470.223	94,04

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	934.900	93,49
						e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	902.840	90,28
						2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.495.867.527	5.415.135.171	98,53
						a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.413.147.527	5.340.261.181	98,65
						b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.220.000	73.500.000	90,49
						c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	912.390	91,24
						d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000	461.600	92,32

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000	460.000	92,00
						a. Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	500.000	460.000	92,00
						4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.275.000	8.802.270	94,90
						a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.775.000	7.410.200	95,31
						b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000	463.470	92,69
						c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000	468.400	93,68
						d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000	460.200	92,04
						5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.470.000	104.153.521	97,81
						a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.985.000	99,81

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000	8.000.000	100
						c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000	10.999.000	99,99
						d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.119.000	18.113.000	99,97
						e. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	28.341.000	28.300.000	99,86
						f. Penyediaan Bahan/ Material	14.777.000	13.437.791	90,94
						g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	17.233.000	16.390.130	95,11
						h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	928.600	92,86
						6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	37.499.999	93,75
						a. Pengadaan Mebel	-	-	-
						b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	37.499.999	93,75

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.412.375	205.476.620	84,42
						a. Penyediaan Jasa Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100
						b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.600.000	67831904	67,43
						c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.512.375	137344716	96,37
						8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.261.000	64.484.300	98,81
						a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000	17.406.500	96,70
						b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.120.000	21.070.000	99,76
						c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.141.000	26.007.800	99,49

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	15.000.000	14.853.000	99,02
						1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	15.000.000	14.853.000	99,02
						a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	15.000.000	14.853.000	99,02
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	130.000.000	130.000.000	100
						1. Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil	130.000.000	130.000.000	100
						a. Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil	130.000.000	130.000.000	100
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	305.000.000	302.045.870	99,03
						1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	305.000.000	302.045.870	99,03
						a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	300.000.000	297.283.060	99,09
						b. Perluasan Kesempatan Kerja	5.000.000	4.762.810	99,26

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	325.000.000	322.057.350	99,09
						1. Pengesahana Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten Kota	50.000.000	49.557.900	99,12
						a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	50.000.000	49.557.900	99,12
						2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000	272.499.450	99,09
						a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	275.000.000	272.499.450	99,09

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
3.	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,0 %	5,47%	273,5%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15.000.000	14.567.500	97,12
4.	Sasaran : Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	3,23 Trilyun Rupiah	3,947 Trilyun Rupiah	121,45 %	Penyusunan dan Evaluasi 1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15.000.000	14.567.500	97,12
						a. Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.000.000	14.567.500	97,12
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	50.000.000	49.629.210	99,26
						1 Penerbitan Izin Usaha . Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	50.000.000	49.629.210	99,26

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)			
						a. Koodinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	49.629.210	99,26
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	135.000.000	133.464.611	98,86
						1 Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI,IPUI,IUKI dan IPKI	135.000.000	133.464.611	98,86
						a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000	49.695.635	99,39

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (klm 9 / klm 8) x 100 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						b. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	85.000.000	83.768.976	98,55
			Total				6.939.785.902	6.806.255.215	98,08

Sumber: Dinperinnaker Kab Rembang

Adapun analisis Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.939.785.902,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.806.255.215,- atau 98,08%. Anggaran sejumlah tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 8 (delapan) program, 16 (enam belas kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

3.6. Analisa Efisiensi Anggaran

Menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

(analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja \geq 100% dan terdapat sisa anggaran)

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Anggaran (Tujuan dan Sasaran) Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tk Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan taraf hidup penduduk miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3%	2,90%	148,28%	6.739.785.902	6.608.593.894	98,05	Belum efisien, karena capaian kinerja belum terpenuhi
	Sasaran: Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	12%	-27,32%	-227,67%				
2.	Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,0 %	5,47%	273,5%	200.000.000	197.661.321	98,83	1,17
	Sasaran: Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	3,23 Trilyun Rupiah	3,947 Trilyun Rupiah	121,45 %				

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

Berdasarkan tabel 3.11, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Dinperinnaker pada Sasaran 1 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal yang mendukung capaian tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan taraf hidup penduduk miskin belum mencapai target kinerja tahun 2025 yaitu capaian kerjanya sebesar -227,67% dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 6.608.593.894 dari pagu sebesar Rp. 6.739.785.902 atau 98,05 % , sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja belum efisien.

Terdapat efisiensi Rp. 131.187.008,- Atau 1,95% yang bersumber dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan Semua Program dan Kegiatan yang mendukung capaian sasaran 1 dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien dan capaian kerjanya sesuai target bahkan ada yang melampaui. Penyebab capaian kinerja dari indikator sasaran 1 yaitu pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal tidak efisien adalah meskipun realisasi kinerja dari serapan tenaga kerja lokal mencapai target tapi realisasi serapan tenaga kerja lokal tahun 2025 (60,71%) lebih rendah dari tahun 2024 (83,53%) sehingga pertumbuhan capaian kerjanya mengalami penurunan .

2. Capaian kinerja Dinperinnaker pada Sasaran 2 Meningkatnya Usaha Industri yang mendukung capaian tujuan 2 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah melampaui target kinerja tahun 2025 yaitu capaian kerjanya sebesar 121,45%% dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 197.661.321,- dari pagu sebesar Rp. 200.000.000,- atau 98,83 % , sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp. 2.338.679,- atau 1,17% yang bersumber dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan . Dari semua Sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran 2 telah efisien, tetapi terdapat program/kegiatan yang mendukung pelaksanaannya belum efisien, yaitu :

- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin

Dari tabel di atas dapat dihitung rata-rata capaian target kinerja indikator tujuan/sasaran sebesar 78,89 % sedangkan rata-rata capaian target kinerja program sebesar 127,318 % dan rata-rata capaian target kinerja Kegiatan sebesar 97,47 % . Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang diampu Dinperinnaker Kabupaten Rembang telah menunjang pencapaian target indikator kinerja utama Dinperinnaker Kabupaten Rembang. Dokumentasi bukti pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator utama di Dinperinnaker Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.

Rekap Dokumentasi Kegiatan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025





♡ 28 💬 ↻ 🚩 1 📌

dinperinnaker.rembangkab Selamat untuk para pemenang Olympiade Ketenagakerjaan, pada rangkaian acara Jobfair Kabupaten Rembang 2025 di Hall Gedung Haji Rembang. lebih sedikit



Sosialisasi ekspor Furniture bagi industri kecil di Kab Rembang tahun 2025



Koordinasi dan kolaborasi Dinperinnaker bersama Balai Standarisasi Nasional Jogjakarta tahun 2025



Sinergi Dinperinnaker Rembang bersama Balai Kreatif Digital Propinsi Jateng dalam branding kemasan produk industri tahun 2025 (24 September 2025)



Bimbingan Teknis Pembuatan Akun Siinas bagi IKM tahun 2025



Verifikasi lapangan pengajuan permohonan Rekomendasi BBM bersubsidi bagi industri kecil 2025



👍 57 💬 3 🔄 1

dinperinnaker.rembangkab Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri (PSDI) bersinergi dengan PT Telkom pada hari Rabu, 4 Juni 2025 menyelenggarakan *Kegiatan Pelatihan Foto Produk dan Dasar AI bagi pelaku usaha Industri Kecil & Menengah (IKM) di Kabupaten Rembang*, bertempat di Rumah BUMN Rembang.

Pelatihan kali ini diikuti oleh 50 IKM yang terbagi dalam dua sesi, sesi pagi mulai jam 09.00 WIB dan sesi siang mulai jam 13.00 Sebagai pemrakarsa dan fasilitator, PT Telkom menghadirkan Profesional Fotografer, Misbahul Munir, sebagai narasumber.



5/22/2025

Kumpul Guyub Tripartit

Bupati Rembang bersama BPJS Ketenagakerjaan



3.7. Lintas Sektor

Inventarisasi lintas sektor Perangkat Daerah yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinperinnaker Kabupaten Rembang:

Tabel 3.12
Inventarisasi Lintas Sektor

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi PD / Klp Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kurikulum pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten	Kebijakan menyelaraskan kurikulum dan kompetensi pendidikan dengan kebutuhan DUDI	Kurikulum industri	Pencari kerja	Mendukung penurunan TPT

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi PD / Klp Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pelatihan Kerja	UPT BLK	Peningkatan kompetensi pencari kerja	sertifikat	Pencari kerja	Mendukung penurunan TPT
3.	Pembinaan IKM	Dindagkop-UKM	Pembinaan dan monev IKM	Dokumen Hasil pembinaan dan Monev	IKM	Mendukung PDRB industri
4.	Ijin Usaha industri	DPMPTSP	Kerjasama perijinan industri	Rekomendasi ijin usaha industri	IKM	Mendukung PDRB industri
5.	Pengolahan data perindustrian dan tenaga kerja	BPS Kabupaten	Data statistik perindustrian dan tenaga kerja	Data perindustrian dan tenaga kerja	Perindustrian dan tenaga kerja	Mendukung data Dinperinnaker
6	Penyelesaian masalah ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	Melayani Jamsostek	Kepesertaan Jamsostek bagi tenaga kerja	Tenaga Kerja	Mendukung Penyelesaian masalah ketenagakerjaan

Sumber: data dari berbagai lintas sektor

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.939.785.902,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.806.255.215,- atau 98,08%. Anggaran sejumlah tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 8 (delapan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.
2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memiliki 2 (dua) tujuan strategis:
 - a. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Realisasi tahun 2025 sebesar 2,90 % dari target 4,3% sehingga capaian kinerjanya sebesar 148,28% (terlampau) dan dalam kriteria penilaian kinerja sangat tinggi.

- b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan. Realisasi tahun 2025 sebesar 5,47 % dari target 2,0 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 273% (terlampau) dan dalam kriteria penilaian kinerja sangat tinggi.
3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang mendukung capaian tujuan strategis:
 - a. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal dengan indikator Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal. Realisasi tahun 2025 sebesar -27,32% dari target 12% sehingga capaian kinerjanya sebesar -227,66% (sangat rendah). Realisasi data pertumbuhan serapan tenaga kerja tahun 2025 sebesar -27,32 didapatkan dari data penyerapan tenaga kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025 dibandingkan dengan data tahun 2024. Menurunnya pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal yang sangat rendah disebabkan oleh kombinasi antara penurunan jumlah permintaan tenaga kerja di Kabupaten Rembang dengan pesimisme pencari kerja, tingginya migrasi ke luar daerah akibat selisih upah (UMK) yang lebih menjanjikan juga ikut mempengaruhi. Kondisi ini juga disebabkan oleh absennya agenda Job Fair sebagai akses informasi, serta struktur industri lokal yang masih didominasi permintaan tenaga kerja perempuan sehingga angkatan kerja laki-laki merasa kehilangan peluang dan berhenti mencari kerja di dalam kabupaten.
 - b. Meningkatnya Usaha Industri dengan indikator Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri. Realisasi tahun 2025 sebesar 3,947% dari target 3,23% sehingga capaian kinerjanya sebesar 122,199% (terlampau) dan dalam kriteria penilaian kinerja sangat tinggi.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah:

- A. Urusan Bidang Perindustrian
 1. Masih rendahnya produk IKM yang memenuhi standarisasi.
 2. Belum optimalnya inovasi teknologi industri.
 3. Belum meratanya persebaran industri di Kabupaten Rembang.
 4. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri yang meliputi pengelolaan lingkungan, Kawasan industri lahan industri dan prasarana penunjang.
 5. Belum optimalnya keterbukaan sektor industri dengan sektor lainnya.

6. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor.
 7. Pemanfaatan sistem informasi (misalnya SIINas) belum maksimal.
- B. Urusan Bidang Tenaga Kerja
1. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja.
 2. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi.
 3. Belum optimalnya pengelolaan data base tenaga kerja.
 4. Sarana dan prasarana balai latihan kerja tidak representatif.
 5. Pemahaman pengusaha dan pekerja tentang kebijakan Hubungan Industrial kurang optimal.
 6. Daya tampung pelaksanaan pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan pencari kerja.
 7. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
 8. Masih tingginya pencari kerja yang belum dapat ditempatkan.
 9. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belum optimal.
 10. Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung program prioritas.
 11. Kompetensi aparatur perlu terus ditingkatkan agar adaptif terhadap regulasi dan dinamika industri.

Faktor kunci keberhasilan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk mencapai sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
2. Koordinasi yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal berjalan dengan baik;
3. Adanya payung hukum yang jelas dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
2. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan IKM dalam peningkatan pertumbuhan IKM dan kualitas produk yang sesuai standarisasi;
3. Memaksimalkan pengendalian dan pengelolaan SIINAS;
4. Mengoptimalkan pengelolaan database tenaga kerja;
5. Peningkatan kompetensi dan penyerapan pencari kerja;
6. Peningkatan Pemahaman pengusaha dan pekerja tentang kebijakan Hubungan Industrial kurang optimal.

7. Melaksanakan koordinasi yang baik antar Bidang maupun instansi terkait dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
8. Adanya dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Rembang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 26 Pebruari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

L A M P I R A N :

- a. SK IKU tahun 2021-2026**
- b. PK Kepala PD tahun 2025**
- c. SK Tim Penyusun LKJ PD tahun 2025**
- d. SK SOP Pengumpulan Data Kinerja**
- e. Profil Indikator**
- f. Pohon / Penjenangan Kinerja**
- g. Cascading Kinerja**
- h. Piagam Penghargaan**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Pemuda KM 3 Rembang Tlp. (0295) 691349 Fax. 691349
REMBANG – 59219

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 800/0013/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang telah diundagkan tanggal 31 Desember 2021;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran Indikator Kinerja Utama tersebut diktum KESATU sebagai acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis:

KETIGA : Indikator Kinerja Utama tersebut diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal, Januari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG



LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.
Nomor : 800 / 0013 / 2023
Tanggal : 3 Januari 2023

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	Tingkat pengangguran terbuka	Sumber data publikasi BPS pada Buku Kabupaten Rembang dalam angka atau situs resmi BPS
2	Pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal	$\frac{\text{Serapan tenaga kerja th}(n) - \text{serapan tenaga kerja th}(n-1)}{\text{Serapan Tenaga Kerja pada th } n} \times 100$
3	Pertumbuhan PDRB sektor industri	Sumber data publikasi BPS pada buku Kabupaten Rembang dalam Angka atau situs resmi BPS
4	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Sumber data publikasi BPS pada Buku Kabupaten Rembang dalam angka atau situs resmi BPS

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG



Drs. DWI MARTOPO
Pembina Tk. I

NIP. 19670313 199401 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Pemuda Km. 3 Telp./ Fax. (0295) Rembang 691349
Kode Pos 59219 website : <http://dinperinnaker.rembang.go.id>
e-mail : dinperinnaker@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

(Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DWI MARTOPO

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HARNO, S.E.

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Rembang, 19 September 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG
(Perubahan)

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan		
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3
1.2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi Terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2.0
2.	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja	12
2.2.	Meningkatnya Ushaa Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	3,23

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.964.785.902,-	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	15.000.000	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	130.000.000	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	305.000.000	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	325.000.000	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	15.000.000	APBD
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	50.000.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	135.000.000	APBD
	Jumlah	6.939.785.902	



Rembang, 19 September 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Pemuda Km. 3 Telp./ Fax. (0295) Rembang 691349
Kode Pos 59219 website : <http://dinperinnaker.rembang.go.id>
e-mail : dinperinnaker@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DWI MARTOPO

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

PIHAK PERTAMA

Drs. DWI MARTOPO
Pembina Utama Muda
NIP. 196703131994011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan		
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3
1.2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi Terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2.0
2.	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja	12
2.2.	Meningkatnya Ushaa Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	3,23

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.799.502.804	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	15.000.000	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	195.000.000	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	420.000.000	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	470.000.000	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	15.000.000	APBD
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.000.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	205.000.000	APBD
	Jumlah	7.219.502.804	



Rembang, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Pemuda Km.3 Telp. (0295) 691349 Fax (0295) 691349 Rembang 59211
Website : <http://dinperinnaker.rembangkab.go.id> email : dinperinnaker@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 000.8.6.3 / 1/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Adapun tugas Tim tersebut sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyiapkan materi sebagai bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
- b. memfasilitasi perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

c. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 dalam bentuk buku.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Rembang selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun 2026.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 13 Januari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG



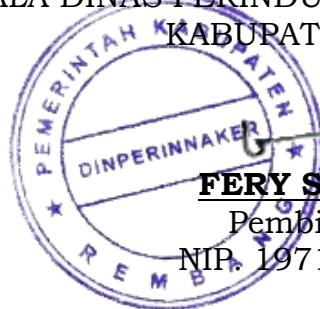
FERY SUMARDI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710225199803 1 004

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Rembang
Nomor : 000.8.6.3 / 1/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
3.	Kasubbag Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Anggota
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Anggota

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710225199803 1 004



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA

Disusun pada tahun
2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG
Jl. Pemuda KM 3 Rembang

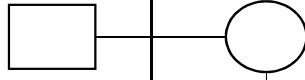
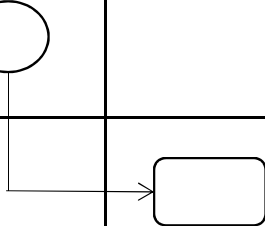
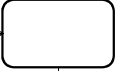
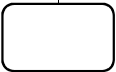
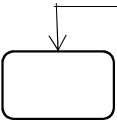
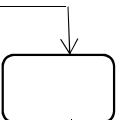


**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**


Nomor SOP	SOP/900/1/009/2025
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2025
Tanggal Revisi	3 Januari 2025
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG  Dwi MARTOPO NIP. 19670313 199401 1 001
Judul SOP	Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah2. Permenpan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah3. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua A5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan dalam pengumpulan data Kinerja;2. Memahami peraturan perundangan terkait data kinerja;3. Memiliki kemampuan dalam menyusun pengumpulan data kinerja;4. Memahami Tujuan Evaluasi pada Akhir Anggaran untuk mengetahui capaian kinerja, keuangan dan fisik yang dijadikan acuan untuk tahun berikutnya
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Renstra Dinperinnaker2. Dokumen Renja Dinperinnaker3. Format pengumpulan data kinerja4. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Pengumpulan data Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengumpulan data Kinerja ini tidak akan berjalan lancar</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran;2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	SEK DIN	KASUBBAG PROGRAM	TIM KINERJA	SEKRETARIAT, BIDANG, UPT DAN STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Dinas memerintahkan Sekdin untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Blangko nota dinas	15 menit	Nota dinas	
2	Sekdin mendelegasikan tugas kepada Kasubbag Program untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Lembar disposisi	15 menit	Lembar disposisi	
3	Kasubbag Program melaksanakan rapat bersama Tim Kinerja untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota dinas dan lembar disposisi	60 menit	Notulen rapat	
4	Tim Kinerja menyusun rencana untuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data						Notulen rapat	120 menit	Program kerja kegiatan	
5	Tim Kinerja mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Dokumen perencanaan data dan anggaran, dokumen evaluasi kinerja, laporan kinerja	2 hari	Check list dokumen	
6	Tim Kinerja menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja						Draft formulir pengumpulan data capaian kinerja	120 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
7	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan ke Sekretariat, Bidang dan UPT BLK						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	15 menit	Bukti tanda terima formulir	

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	SEKDIN	KASUBBAG PROGRAM	TIM KINERJA	SEKRETARIAT, BIDANG, UPT DAN STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8	Sekdin, Kepala Bidang, Kepala BLK dibantu staf masing-masing mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja, selanjutnya menyerahkan formulir yang sudah diisi kepada Tim Kinerja						Blangko nota dinas	15 menit	Nota dinas	
9	Tim Kinerja merekap data capaian kinerja						Nota dinas	60 menit	Notulen rapat	
10	Tim Kinerja melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Kasubbag Program						Notulen rapat	120 menit	Program kerja kegiatan	
11	Kasubbag Program menganalisa laporan hasil rekapitulasi data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka akan dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan			Ya	Tidak		Draft laporan hasil pengumpulan data kinerja	100 menit	Draft laporan hasil pengumpulan data kinerja yang sudah dianalisa	
12	Kasubbag Program melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Sekdin						Draft laporan hasil pengumpulan data kinerja	30 menit	Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
13	Sekdin menyusun Laporan Kinerja untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas						Laporan hasil pengumpulan data kinerja, lembar disposisi	60 menit	Disposisi Kepala Dinas	

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	SEKDIN	KASUBBAG PROGRAM	TIM KINERJA	SEKRETARIAT, BIDANG, UPT DAN STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
14	Pengarsipan Data Kinerja						Arsip hasil pengumpulan data			

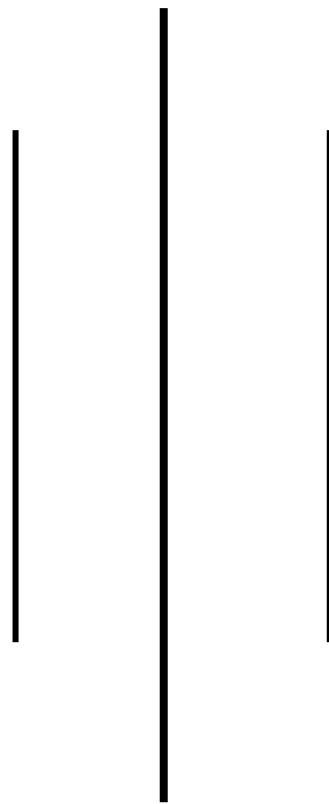
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG**



Drs. DWI MARTOPO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670313 199403 1 001



PROFIL INDIKATOR KINERJA



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

Indikator Kinerja	:	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industry pengolahan
Definisi Indikator Kinerja	:	PDRB sektor industri pengolahan pada Tahun n dibanding PDRB sektor pengolahan pada Tahun n-1
Tujuan	:	Untuk mengetahui Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{PDRB sektor industri pengolahan pada Tahun n} - \text{PDRB sektor pengolahan pada Tahun n-1}}{\text{PDRB sektor pengolahan pada Tahun n-1}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Undang – Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
		Permenperin No. 15 tahun 2019 tentang penerbitan IUI dan Izin Perluasan Industri
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya Kompetensi SDM
		Kurangnya sarana prasarana dalam sosialisasi
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Data Rembang Dalam Angka/ PDRB Kabupaten Rembang yang dirilis oleh BPS

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri dibanding total PDRB ADHK

Indikator Kinerja	:	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri
Definisi Indikator Kinerja	:	PDRB ADHK Sektor Industri pada Tahun n dibanding total PDRB ADHK secara keseluruhan
Tujuan	:	Untuk mengetahui berapa besar rupiah kontribusi PDRB ADHK sektor industry di Kabupaten Rembang pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	Penghitungan PDRB ADHK oleh BPS Rembang
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Undang – Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
		Permenperin No. 15 tahun 2019 tentang penerbitan IUI dan Izin Perluasan Industri
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya Kompetensi SDM
		Kurangnya sarana prasarana dalam sosialisasi
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Data Rembang Dalam Angka/ PDRB Kabupaten Rembang yang dirilis oleh BPS

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Persentase peningkatan calon tenaga kerja yang berhasil ditempatkan

Indikator Kinerja	:	Persentase peningkatan Penempatan tenaga kerja
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai Persentase peningkatan pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada Tahun n dibanding pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada Tahun n
Tujuan	:	Persentase peningkatan calon tenaga kerja yang berhasil ditempatkan
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada Tahun } n \text{ dibanding pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada Tahun } n-1}{\text{pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada Tahun } n-1} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2007 Permenaker No 17 Tahun 2010
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan jumlah data yang tersedia Keterbatasan sarana dan prasarana
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	laporan implementasi kegiatan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Persentase perselisihan hubungan industrial yang telah diselesaikan

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Definisi Indikator kinerja	:	Persentase perselisihan hubungan industrial yang telah diselesaikan dibanding jumlah total perselisihan yang terjadi
Tujuan	:	Menghitung Persentase perselisihan hubungan industrial yang telah diselesaikan dibanding jumlah total perselisihan yang terjadi
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang telah diselesaikan dibagi jumlah total perselisihan yang terjadi kali 100%
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan hasil penyelesaian perselisihan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Prosentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	:	Persentase Implementasi Rencana Tenaga Kerja
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase implementasi kegiatan yang dilaksanakan pada 1 tahun terhadap jumlah kegiatan yang ada pada RTKD
Tujuan	:	Untuk mengetahui persentase kegiatan yang sudah dilaksanakan dibanding jumlah rencana kegiatan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi total kegiatan pada RTKD
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2007 Permenaker No 17 Tahun 2010
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan jumlah data yang tersedia Keterbatasan sarana dan prasarana
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen RTKD, laporan implementasi kegiatan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Persentase Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

Indikator Kinerja	:	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompeten
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai presentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibandingkan total jumlah tenaga kerja pada 1 tahun di Kabupaten Rembang
Tujuan	:	Untuk mengetahui persentase tenaga kerja bersertifikat dibandingkan total tenaga kerja
Rumus Pengukuran	:	presentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi total jumlah tenaga kerja pada 1 tahun di Kabupaten Rembang
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2007 Permenaker No 17 Tahun 2010
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan jumlah data yang tersedia Keterbatasan sarana dan prasarana
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen laporan tenaga kerja

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Prosentase Tenaga Kerja yang memperoleh Penempatan

Indikator Kinerja	:	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase antara tenaga kerja yang ditempatkan pada 1 tahun terhadap jumlah pencari kerja di Kabupaten Rembang
Tujuan	:	Untuk mengetahui persentase tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan jumlah seluruh pencari kerja
Rumus Pengukuran	:	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah total pencari kerja
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2007 Permenaker No 17 Tahun 2010
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Keterbatasan jumlah data yang tersedia Keterbatasan sarana dan prasarana
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen laporan pelaksanaan penempatan tenaga kerja

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	:	Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
Definisi Indikator kinerja	:	Presentase tenaga kerja yang telah menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibanding total jumlah tenaga kerja dalam 1 tahun
Tujuan	:	Untuk mengetahui presentase tenaga kerja yang telah menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibanding total jumlah tenaga kerja dalam 1 tahun
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah tenaga kerja yang telah menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibagi total jumlah tenaga kerja tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen Pendataan dan Pembinaan ke Perusahaan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan aturan

Indikator Kinerja	:	Persentase Perusahaan yang taat aturan
Definisi Indikator kinerja	:	Jumlah perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan, Peraturan Kerja Bersama, Pencatatan PKWT, menerapkan Struktur Skala Upah, membentuk LKS Bipartit, Program jaminan sosial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial disbanding jumlah total Perusahaan pada 1 tahun
Tujuan	:	Untuk mengetahui jumlah perusahaan yang sudah melaksanakan aturan HI disbanding total Perusahaan dalam 1 tahun
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah Perusahaan yang taat aturan dibagi Jumlah total Perusahaan pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen Pendataan dan Pembinaan ke Perusahaan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Persentase usaha industri yang memiliki ijin usaha
disbanding total jumlah industri yang ada

Indikator Kinerja	:	Persentase usaha industri yang memiliki ijin usaha
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah usaha industri yang memiliki ijin pada tahun n dibanding dengan total Jumlah usaha industri pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui persentase usaha industri yang memiliki ijin usaha disbanding total jumlah usaha industry yang ada
Rumus Pengukuran	:	Jumlah usaha industri yang memiliki ijin pada tahun n dibagi total Jumlah usaha industri pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Undang – Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
		Permenperin No. 15 tahun 2019 tentang penerbitan IUI dan Izin Perluasan Industri
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya Kompetensi SDM
		Kurangnya sarana prasarana dalam sosialisasi
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen Laporan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Persentase Usaha industri yang telah masuk dalam Data Base (SIINas)

Indikator Kinerja	:	% Usaha industri yang masuk Data Base
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase Usaha Industri yang masuk dalam database SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dibanding total jumlah industri
Tujuan	:	Untuk mengetahui Usaha Industri yang masuk dalam database SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dibanding total jumlah industri
Rumus Pengukuran	:	Jumlah industri yang memiliki akun SIINas Th (n) dibagi total jumlah Industri Th n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	- Undang – Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
		- Permenperin No. 15 tahun 2019 tentang penerbitan IUI dan Izin Perluasan Industri
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	- Kurangnya Kompetensi SDM sosialisasi dan pendampingan Aplikasi SIINas
		- Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung sosialisasi dan pendampingan Aplikasi SIINas
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen Laporan /Pusdatin Kementerian Perindustrian

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja
Definisi Indikator Kinerja	:	Dokumen rencana tenaga kerja yang disusun
Tujuan	:	Dokumen rencana tenaga kerja yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah (RTKD) pada Tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Kesulitan sinkronisasi target dan indikator pada dokumen perencanaan lainnya (RTKN, RPJPD, RPJMD)
		• Kesulitan inventarisasi data penunjang dokumen RTKD
		• Kekurangan Sumber daya penunjang (SDM dan anggaran)
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen RTKD

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja Makro

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja Makro
Definisi Indikator Kinerja	:	Dokumen rencana tenaga kerja makro yang disusun
Tujuan	:	Dokumen rencana tenaga kerja makro yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan secara makro
Rumus Pengukuran	:	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro pada Tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Kesulitan sinkronisasi target dan indikator pada dokumen perencanaan lainnya (RTKN, RPJPD, RPJMD)
		• Kesulitan inventarisasi data penunjang dokumen RTKD
		• Kekurangan Sumber daya penunjang (SDM dan anggaran)
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen RTK makro

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja Mikro

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja Mikro
Definisi Indikator Kinerja	:	Dokumen rencana tenaga kerja mikro yang disusun
Tujuan	:	Dokumen rencana tenaga kerja mikro yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan secara mikro
Rumus Pengukuran	:	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja mikro pada Tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Kesulitan sinkronisasi target dan indikator pada dokumen perencanaan lainnya (RTKN, RPJPD, RPJMD)
		• Kesulitan inventarisasi data penunjang dokumen RTKD
		• Kekurangan Sumber daya penunjang (SDM dan anggaran)
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen RTK mikro

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Meningkatnya jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

Indikator Kinerja	:	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase antara tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan terhadap total tenaga kerja
Tujuan	:	Untuk menilai persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dibanding total tenaga kerja pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dibagi total tenaga kerja pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pelatihan
		• Kondisi sarpras BLK yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	UPT BLK Dinperinnaker Kab. Rembang
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Indikator Kinerja	:	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah total tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Tujuan	:	Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pelatihan
		• Kondisi sarpras BLK yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	UPT BLK Dinperinnaker Kab. Rembang
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Adanya kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan pprasarana pelatihan dan produktivitas

Indikator Kinerja	:	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan pprasarana pelatihan dan produktivitas pada tahun n
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan pprasarana pelatihan dan produktivitas pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan pprasarana pelatihan dan produktivitas pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan dan produktivitas pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pelatihan
		• Kondisi sarpras BLK yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	UPT BLK Dinperinnaker Kab. Rembang
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Jumlah kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja

Indikator Kinerja	:	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja pada tahun n pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja pada tahun n pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarpras
		• Kondisi sarpras BLK yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	UPT BLK Dinperinnaker Kab. Rembang
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan vokasi berbasis kompetensi

Indikator Kinerja	:	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah total tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan vokasi berbasis kompetensi
Tujuan	:	Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan vokasi berbasis kompetensi pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan vokasi berbasis kompetensi pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pelatihan
		• Kondisi sarpras BLK yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	UPT BLK Dinperinnaker Kab. Rembang
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Jumlah kegiatan pengadaan sarana pelatihan vokasi dan produktivitas

Indikator Kinerja	:	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan vokasi dan produktivitas
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarpras
		• Kondisi sarpras BLK yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	UPT BLK Dinperinnaker Kab. Rembang
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Peningkatan Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional

Indikator Kinerja	:	Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pembinaan LPK
		• Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Peningkatan Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina

Indikator Kinerja	:	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina oleh pemerintah pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pembinaan LPK
		• Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Peningkatan Jumlah lembaga pelatihan kerja yang berizin

Indikator Kinerja	:	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang berizin
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang berizin pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui Jumlah lembaga pelatihan kerja yang berizin pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total lembaga pelatihan kerja yang berizin pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pembinaan LPK
		• Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Tersedianya sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi

Indikator Kinerja	:	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	jumlah total sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran pembinaan LPK
		• Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Peningkatan produktivitas Perusahaan kecil

Indikator Kinerja	:	Jumlah Perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya
Definisi Indikator kinerja	:	Jumlah Perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya sehingga Perusahaan kecil dapat semakin berkembang
Tujuan	:	Untuk mengetahui Jumlah Perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya dalam 1 tahun
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah Perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen Pendataan dan Pembinaan ke Perusahaan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Konsultasi peningkatan produktivitas padaPerusahaan kecil

Indikator Kinerja	:	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas
Definisi Indikator kinerja	:	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi oleh pemerintah daerahdalam rangka peningkatan produktivitas prusahaan
Tujuan	:	Untuk mengetahui Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas dalam 1 tahun
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen Pendataan dan Pembinaan ke Perusahaan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Peningkatan produktifitas tenaga kerja

Indikator Kinerja	:	Tingkat produktivitas tenaga kerja
Definisi Indikator kinerja	:	Pengukuran produktivitas tenaga kerja Kabupaten Rembang pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui Tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat daerah yang didokumentasikan

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat daerah
Definisi Indikator kinerja	:	Pengukuran kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat daerah yang didokumentasikan pada tahun n
Tujuan	:	Untuk menyusun dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat daerah pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat daerah tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pelayanan antar kerja bagi pencari kerja di daerah

Indikator Kinerja	:	Jumlah layanan antar kerja di daerah
Definisi Indikator kinerja	:	Jumlah layanan antar kerja bagi para pencari kerja di daerah pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan pelayanan antar kerja bagi pencari kerja pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah layanan antar kerja daerah yang dilaksanakan pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pelaksanaan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan antar kerja

Indikator Kinerja	:	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi
Definisi Indikator kinerja	:	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi pada tahun n
Tujuan	:	Untuk meningkatkan kompetensi SDM pelayanan antar kerja yang melalui pelatihan, bimtek dan lain-lain pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi pada tahun n pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pelaksanaan pelayanan antar kerja melalui AKAD dan AKL

Indikator Kinerja	:	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL
Definisi Indikator kinerja	:	Jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL pada tahun n
Tujuan	:	Untuk menempatkan tenaga kerja yang telah dilayani melalui AKAD dan AKL pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Total jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan kepada pencari kerja

Indikator Kinerja	:	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan
Definisi Indikator kinerja	:	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan pada tahun n
Tujuan	:	Untuk meningkatkan pemahaman kepada pencari kerja dengan melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Total Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Fasilitas layanan ULD yang diberikan kepada tenaga kerja disabilitas

Indikator Kinerja	:	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD
Definisi Indikator kinerja	:	Pemberian fasilitas layanan ULD kepada tenaga kerja disabilitas pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan fasilitas layanan ULD kepada tenaga kerja disabilitas pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Total jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pemberdayaan tenaga kerja melalui program perluasan kesempatan kerja

Indikator Kinerja	:	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja
Definisi Indikator kinerja	:	Pemberdayaan tenaga kerja melalui program perluasan kesempatan kerja pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberdayakan tenaga kerja melalui program perluasan kesempatan kerja pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Total Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Tersedianya LPTKS yang memiliki izin

Indikator Kinerja	:	Jumlah LPTKS berizin
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah LPTKS yang memiliki izin pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mendorong LPTKS agar memiliki perizinan pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	Jumlah total LPTKS yang memiliki izin pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran
		• Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Tersedianya LPTKS yang memiliki izin terintegrasi

Indikator Kinerja	:	Jumlah perizinan LPTKS yang terintegrasi
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah LPTKS berizin yang terintegrasi pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mendorong LPTKS agar memiliki perizinan terintegrasi pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	Jumlah total LPTKS yang memiliki izin terintegrasi pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran
		• Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME : Pengawasan dan pengendalian LPTKS sesuai dengan aturan yang berlaku

Indikator Kinerja	:	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku
Definisi Indikator Kinerja	:	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian LPTKS sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun n
Tujuan	:	Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian LPTKS sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun n
Rumus Pengukuran	:	Jumlah total LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	• UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
		• Permen no 8 tahun 2014 tentang pelatihan berbasis kompetensi
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Keterbatasan anggaran
		• Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pemberian layanan informasi pasar kerja

Indikator Kinerja	:	Jumlah layanan informasi pasar kerja
Definisi Indikator kinerja	:	Memberikan informasi kepada Masyarakat khususnya pencari kerja tentang informasi pasar kerja melalui berbagai media pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat khususnya pencari kerja tentang informasi pasar kerja melalui berbagai media pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Total jumlah layanan informasi pasar kerja pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pemberian layanan informasi pasar kerja melalui aplikasi pasar kerja online

Indikator Kinerja	:	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online
Definisi Indikator kinerja	:	Memberikan informasi kepada Masyarakat khususnya pencari kerja tentang informasi pasar kerja melalui aplikasi informasi pasar kerja online pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat khususnya pencari kerja tentang informasi pasar kerja melalui aplikasi informasi pasar kerja online pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Total data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Daftar pencari kerja dan pemberi kerja yang telah masuk dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)

Indikator Kinerja	:	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)
Definisi Indikator kinerja	:	Menampilkan daftar pencari kerja dan pemberi kerja yang telah masuk dalam pasar kerja melalui system online (karir hub) pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mendata pencari kerja dan pemberi kerja yang telah masuk dalam pasar kerja melalui system online (karir hub) pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Daftar pencari kerja dan pemberi kerja yang telah masuk dalam pasar kerja melalui system online (karir hub) pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair

Indikator Kinerja	:	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair
Definisi Indikator kinerja	:	Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti job fair pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan sarana bagi pencari kerja agar mendapatkan pekerjaan melalui kegiatan job fair pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten
Rembang

Indikator Kinerja	:	Jumlah PMI/ CPMI terfasilitasi
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten Rembang pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten Rembang pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten Rembang yang difasilitasi pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Fasilitasi perlindungan dan peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten Rembang

Indikator Kinerja	:	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan Fasilitasi perlindungan dan peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten Rembang pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan Fasilitasi perlindungan dan peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten Rembang pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten Rembang yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Fasilitasi pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Rembang sesuai dengan prosedur dalam LTSA serta penanganan PMI yang bermasalah

Indikator Kinerja	:	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang tertangani
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Rembang sesuai dengan prosedur dalam LTSA serta penanganan PMI yang bermasalah
Tujuan	:	Untuk memberikan pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Rembang sesuai dengan prosedur dalam LTSA serta penanganan PMI yang bermasalah pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total Pekerja Migran Indonesia/ CPMI asal Kabupaten Rembang yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang tertangani pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Fasilitasi pemberdayaan purna PMI asal Kabupaten Rembang

Indikator Kinerja	:	Jumlah PMI purna yang diberdayakan
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan Fasilitasi pemberdayaan purna PMI asal Kabupaten Rembang pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan Fasilitasi pemberdayaan purna PMI asal Kabupaten Rembang pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Rembang pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja	:	Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan pengawasan badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan pada tahun n
Tujuan	:	Untuk memberikan pengawasan badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah Perusahaan yang menyusun peraturan Perusahaan dan terdaftar di WLKP online

Indikator Kinerja	:	Jumlah Perusahaan yang menyusun peraturan Perusahaan dan terdaftar di WLKP online
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan penyusunan peraturan Perusahaan dan terdaftar di WLKP online pada tahun n
Tujuan	:	Untuk menyusun peraturan Perusahaan dan terdaftar di WLKP online pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total Perusahaan yang menyusun peraturan Perusahaan dan terdaftar di WLKP online pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja Bersama dan terdaftar di WLKP online

Indikator Kinerja	:	Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja Bersama dan terdaftar di WLKP online
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan penyusunan peraturan Perusahaan dan terdaftar di WLKP online pada tahun n
Tujuan	:	Untuk menyusun perjanjian kerja Bersama dan terdaftar di WLKP online pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja Bersama dan terdaftar di WLKP online pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartite) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan

Indikator Kinerja	:	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartite) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartite) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengelola data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartite) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartite) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none">- UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan- UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja- PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya SDM- Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah pencegahan perselisihan yang dilakukan oleh perusahaan

Indikator Kinerja	:	Jumlah Perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan pencegahan perselisihan yang dilakukan oleh Perusahaan pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mencegah potensi perselisihan yang terjadi yang dilakukan oleh Perusahaan pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total Perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial

Indikator Kinerja	:	Jumlah perselisihan yang dicegah
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan pencegahan perselisihan hubungan industrial pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mencegah potensi perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total perselisihan yang dicegah pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial

Indikator Kinerja	:	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahun n
Tujuan	:	Untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada hubungan industrial pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total perselisihan yang diselesaikan pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah verifikasi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja

Indikator Kinerja	:	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan verifikasi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja pada tahun n
Tujuan	:	Untuk melaksanakan verifikasi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah total asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah pembinaan LKS tripartit

Indikator Kinerja	:	Jumlah LKS tripartit yang dibina
Definisi Indikator kinerja	:	Pelaksanaan pembinaan LKS tripartit pada tahun n
Tujuan	:	Untuk melaksanakan pembinaan LKS tripartit pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah LKS tripartit yang dibina pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	:	Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan
Definisi Indikator kinerja	:	Fasilitasi pendaftaran tenaga kerja kdalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun n
Tujuan	:	Untuk melaksanakan pendaftaran tenaga kerja kdalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah Pengelolaan database industri

Indikator Kinerja	:	Jumlah database Industri yang dikelola dengan baik
Definisi Indikator kinerja	:	Fasilitasi pengelolaan database industri pada tahun n
Tujuan	:	Untuk melaksanakan Fasilitasi pengelolaan database industri pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah database Industri yang dikelola dengan baik pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembangunan Sistem Informasi Industri
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data Kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/ kota melalui system informasi industry nasional (Silnas)

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data Kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/ kota melalui SIInas
Definisi Indikator kinerja	:	fasilitasi penyusunan dokumen pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data Kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/ kota melalui Siinas pada tahun n
Tujuan	:	Untuk melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data Kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/ kota melalui SIInas pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data Kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/ kota melalui system informasi industry nasional (Silnas) pada tahun n
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembangunan Sistem Informasi Industri
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industry kabupaten/ kota melalui SIIInas

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industry kabupaten/ kota melalui SIIInas
Definisi Indikator kinerja	:	Penyusunan dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industry kabupaten/ kota melalui SIIInas pada tahun n
Tujuan	:	Untuk mengetahui data hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industry kabupaten/ kota melalui SIIInas pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industry kabupaten/ kota melalui SIIInas
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembangunan Sistem Informasi Industri
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG

KODE OUTCOME :

PERNYATAAN OUTCOME: Pemantauan dan evaluasi kepatuhan Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan industry lingkup kabupaten/ kota dalam penyampaian data ke SIIInas

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan industry lingkup kabupaten/ kota dalam penyampaian data ke SIIInas
Definisi Indikator kinerja	:	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan industry lingkup kabupaten/ kota dalam penyampaian data ke SIIInas
Tujuan	:	Untuk melaksanakan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan industry lingkup kabupaten/ kota dalam penyampaian data ke SIIInas pada tahun n
Rumusan Pengukuran	:	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan Perusahaan industry dan Perusahaan Kawasan industry lingkup kabupaten/ kota dalam penyampaian data ke SIIInas
Hal-hal yang mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja, Hubungan Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja
Hal-hal yang menghambat pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Pembangunan Sistem Informasi Industri
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Dokumen evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

Pernyataan Outcome: Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	:	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase antara target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan terhadap realisasi capaian kinerja
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan dibandingkan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Rumus Pengukuran	:	nilai capaian (masing-masing indikator)/ target (masing-masing indikator)* 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	- UU no 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peencanaan pembangunan
	:	- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
	:	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKP
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	- kurang nya kemampuan SDM
	:	- kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi triwulanan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil evaluasi pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

Pernyataan Outcome : Peningkatan kualitas Dokumen pelaporan keuangan

Indikator Kinerja	:	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase antara dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terhadap seluruh dokumen pelaporan keuangan (CALK tahunan dan semesteran)
Tujuan	:	Untuk menilai kualitas pelaporan keuangan yang telah disusun baik semesteran maupun tahunan
Rumus Pengukuran	:	jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik/ jumlah dokumen pelaporan keuangan * 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - kurang nya kemampuan SDM - kurangnya jumlah SDM penata kauangan
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi tiap semester
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :
Pernyataan Outcome : Meningkatnya Budaya Lokal dalam rangka Pemanfaatan Pariwisata

Indikator Kinerja	:	% Dokumen Penatausahaan BMD Dengan Kualitas Baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase antara dokumen penatausahaan Barang Milik daerah dengan kualitas baik terhadap seluruh dokumen penatausahaan (KIP, KIR, Simda BMD, laporan penghapusan, dll)
Tujuan	:	Untuk menilai kualitas dokumen penatausahaan barang milik daerah yang telah disusun baik semesteran maupun tahunan
Rumus Pengukuran	:	jumlah dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik/ jumlah seluruh dokumen penatausahaan BMD * 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D - Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD - Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMD - Permendagri No 1 Th 2019 ttg Penyusutan BMD - Permendagri No 47 Th 2021 ttg Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan BMD
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	kurang nya kemampuan SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi tiap semester
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen penatausahaan BMD semesteran dan tahunan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

Pernyataan Outcome : Peningkatan kualitas dokumen kepegawaian yang

Indikator Kinerja	:	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase antara dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik terhadap seluruh dokumen kepegawaian (dokumen kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengajuan pensiun, SKP, surat cuti, mutasi pegawai, dll)
Tujuan	:	Untuk menilai pengelolaan dokumen kepegawaian baik dalam setahun
Rumus Pengukuran	:	jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik/ jumlah seluruh dokumen kepegawaian * 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU NO. 5 Tahun 2014 Tentang ASN - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - kurang nya kemampuan SDM - kurangnya personil/ SDM pengelola kepegawaian
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Non Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen kepegawaian ASN Dinperinnaker dalam 1 tahun

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

Pernyataan Outcome : Meningkatnya pemenuhan pelayanan umum

Indikator Kinerja	:	% pemenuhan pelayanan umum
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase pelayanan umum yang terpenuhi terhadap seluruh seluruh pelayanan umum yang ada (pemenuhan perjalanan dinas, ATK, Rumah tangga, dll)
Tujuan	:	Untuk menilai pelayanan umum yang telah dipenuhi selama 1 tahun
Rumus Pengukuran	:	jumlah pelayanan umum yang telah dipenuhi/ jumlah seluruh pelayanan umum * 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	- kurang nya kemampuan SDM - kurangnya anggaran - kurangnya personil/ SDM pelayanan umum
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	non Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen laporan pemenuhan pelayanan umum

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

Pernyataan Outcome : Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja	:	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase sarana prasarana aparatur yang tercukupi terhadap total kebutuhan sarana prasarana aparatur (mencukupi pemeliharaan laptop, AC, printer, meubelair, dll)
Tujuan	:	Untuk menilai ketercukupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
Rumus Pengukuran	:	jumlah kebutuhan sarpras aparatur yang telah tercukupi/ jumlah kebutuhan sarpras aparatur * 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	kurangnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen laporan ketercukupan sarpras aparatur

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :
Pernyataan Outcome : Penyesuaian spesifikasi BMD saat proses pengadaan barang/jasa

Indikator Kinerja	:	% kesesuaian spesifikasi BMD saat proses pengadaan barang/jasa
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase spesifikasi BMD yang sesuai saat proses pengadaan barang/ jasa terhadap total proses pengadaan b/j (dokumen kontrak, surat pesanan)
Tujuan	:	Untuk menilai spesifikasi BMD yang telah sesuai saat proses pengadaan barang dan jasa selama 1 tahun
Rumus Pengukuran	:	jumlah pengadaan barang dan jasa yang telah sesuai spesifikasi BMD / jumlah pengadaan barang dan jasa * 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - keterbatasan jumlah personil/ SDM pengadaan barang/ jasa - kurangnya kapasitas SDM
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen laporan BMD pengadaan

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

Pernyataan Outcome : Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran

Indikator Kinerja	:	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase pelayanan penunjang perkantoran yang terpenuhi terhadap total kebutuhan pelayanan penunjang perkantoran (SDM kontrak dan tenaga harian, listrik, air, telpon)
Tujuan	:	Untuk menilai kebutuhan pelayanan penunjang perkantoran yang telah terpenuhi dibanding total kebutuhan pelayanan penunjang perkantoran selama 1 tahun
Rumus Pengukuran	:	jumlah pelayanan penunjang perkantoran yang telah terpenuhi/ jumlah total kebutuhan pelayanan penunjang perkantoran* 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	keterbatasan jumlah anggaran

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINPERINNAKER
KABUPATEN REMBANG**

KODE OUTCOME :

Pernyataan Outcome : BMD dengan kondisi Baik

Indikator Kinerja	:	% BMD dengan kondisi Baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai persentase antara Barang milik daerah dengan kondisi baik terhadap barang milik daerah yang dimiliki (gedung, kendaraan, sarpras BMD lain)
Tujuan	:	Untuk menilai kualitas barang milik daerah yang dimiliki
Rumus Pengukuran	:	jumlah BMD dengan kondisi baik/ jumlah seluruh BMD * 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D - Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD - Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMD - Permendagri No 1 Th 2019 ttg Penyusutan BMD - Permendagri No 47 Th 2021 ttg Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan BMD
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - kurang nya kemampuan SDM - kurangnya anggaran pemeliharaan
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, disajikan evaluasi tiap semester
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Dokumen laporan BMD semesteran dan tahunan

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang

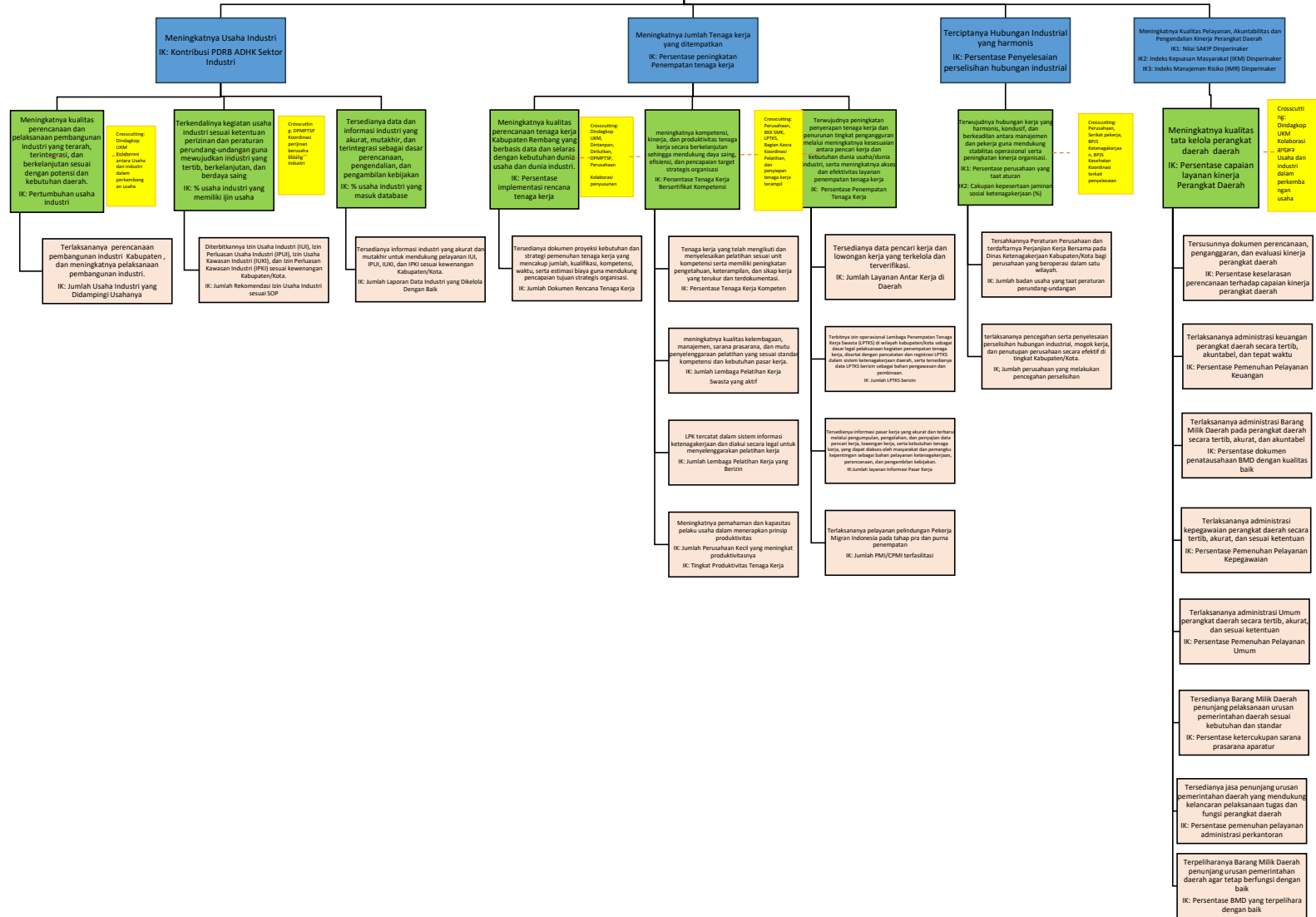


Drs. DWI MARTOPO

NIP. 196703131994011001

POHON KINERJA 2022-2026 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sasaran 1: Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja Lokal
IK : Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal
Sasaran 2: Meningkatkan Usaha Industri
IK : Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri



Rembang, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Rembang



Drs. DW. MARTOPO

NIP. 136703131994011001

Program	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	% Ciri Merek yang Terdaftar dan Dilindungi	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Peningkatan...

Program	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20

Program	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Program	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Program	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Sub kegiatan	Indikator	Target
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri dan Jasa	Jumlah Sertifikasi Produk Industri dan Jasa	2022-25
		2022-20
		2022-15
		2022-10

Rembang, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang



Drs. DW. MARTOPO
NIP. 19703131994011001



BUPATI REMBANG
PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang

Atas Pencapaian Prestasi

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tertinggi Tahun 2023

Peringkat Ketiga Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

(Hasil pengukuran dari Badan Pusat Statistik)

Rembang, 5 Januari 2024

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 500.9 / 570


Diberikan Kepada:
Dinperinnaker Kab. Rembang

atas prestasinya :

Dalam pencapaian Target Pendataan Industri Kecil Tahun 2023 Melalui
Sistem informasi Industri Nasional (SIINas) sebesar 110%
66 dari target 60 Industri Kecil

Semarang, 26 Januari 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Prov Jateng


Ratna Kawuri, SH

02/03/2026 08:18

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 500.9/703

Diberikan Kepada :

DINPERINNAKER KAB. REMBANG

Atas prestasinya :

Dalam pencapaian target Pendataan Industri Kecil Tahun 2024 melalui
Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas) sebesar 148%
74 dari target 50 Industri Kecil

Semarang, 04 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah



Ir. Sakina Rosellasari, M.Si., M.Sc.





**BUPATI REMBANG
PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor : 400.3.3.4/5510.2025

DIBERIKAN KEPADA :

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG**

Sebagai

JUARA HARAPAN 1

PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF

PADA PENGHARGAAN "REMBANG INNOVATION AWARD" TAHUN 2025

INOVASI

"PELAYANAN POJOK NAKERBISA"

Rembang, 03 Desember 2025

BUPATI REMBANG



[Signature]
H. HARNO, S.E.



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0001455

Dasar : Berita Resmi Statistik (BRS) No.68/11/33/Th.XVII tanggal 6 November 2023 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Penghargaan kepada :

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG**

Atas capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terendah peringkat III
Kabupaten Kota se Jawa Tengah Tahun 2023



Semarang, 19 Februari 2024

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

02/03/2026 08:18